

**ANALISA PELAKSANAAN PUTUSAN PERADILAN AGAMA TERHADAP
NAFKAH PERCERAIAN DALAM PRESPEKTIF HUKUM NASIONAL
DAN HUKUM ISLAM BAGI PNS**

TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Derajat Gelar S-2
Program Studi Magister Ilmu Hukum**



Disusun oleh:

**RENDRA WIDYAKSO
NIM: 201710380211004**

**DIREKTORAT PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
SEPTEMBER 2020**

**ANALISA PELAKSANAAN PUTUSAN PERADILAN AGAMA TERHADAP
NAFKAH PERCERAIAN DALAM PRESPEKTIF HUKUM NASIONAL
DAN HUKUM ISLAM BAGI PNS**

**RENDRA WIDYAKSO
201710380211004**

Telah disetujui


Pada hari/tanggal, **Senin / 07 September 2020**

Pembimbing Utama



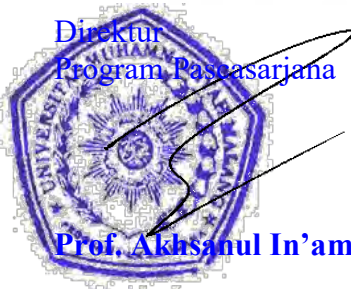
Mokh. Najih., Ph.D

Pembimbing Pendamping



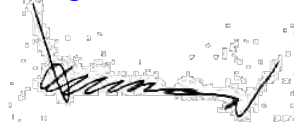
Dr. Fifik Wiryani

Direktur
Program Pascasarjana



Prof. Akhsanul In'am, Ph.D

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum



Mokh. Najih., Ph.D

TESIS

DWI ARMY OKIK ARISSANDI
201810380211018

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada hari/tanggal, Senin / 07 September 2020
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Magister/Profesi di Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua / Penguji : Mokh, Najih, Ph.D

Sekretaris / Penguji : Dr. Fifik Wiryani

Penguji : Dr. Surya Anoraga

Penguji : Dr. Herwastoeti

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : **RENDRA WIDYAKSO**

NIM : **201710380211004**

Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. TESIS dengan judul : **ANALISA PELAKSANAAN PUTUSAN PERADILAN AGAMA TERHADAP NAFKAH PERCERAIAN DALAM PRESPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN HUKUM ISLAM BAGI PNS** adalah karya saya dan dalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.
2. Apabila ternyata dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia Tesis ini **DIGUGURKAN** dan **GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN**, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tesis ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan **HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 07 September 2020

Yang menyatakan,



RENDRA WIDYAKSO

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Puja dan puji syukur kepada Allah swt; pemimpin, penguasa, sekaligus pemilik semesta alam. Hanya dengan nikmat, karunia, dan kesempatanNya penelitian ini dapat diselesaikan. Maha pemurah Allah yang telah menciptakan Nabi dan Rasul Muhammad saw, sebagai pemimpin dan panutan manusia tanpa batasan wilayah dan waktu. Ucapan terima kasih sebesar-besarnya saya haturkan kepada pihak yang telah membantu dan membimbing dalam proses penulisan penelitian ini, sehingga mampu menyelesaikan penulisan hukum (tesis) ini dengan baik dan lancar, yaitu dengan judul **“ANALISA PELAKSANAAN PUTUSAN PERADILAN AGAMA TERHADAP NAFKAH PERCERAIAN DALAM PRESPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN HUKUM ISLAM BAGI PNS”** yang merupakan tugas akhir sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi di Magister Ilmu Hukum, Direktorat Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Malang. Dengan segala kerendahan hati ucapan terima kasih saya sampaikan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran dalam menempuh pendidikan.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, Dr. H. Fauzan, M.Pd., beserta seluruh jajaran pejabat, tenaga pengajar, dan staff tata usaha Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Akhsanul In'am, Ph.D, selaku direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang, sekaligus pembimbing dalam penyusunan penelitian ini. Terima kasih atas kesempatan, arahan, bimbingan serta ilmunya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan meskipun memakan waktu dan proses yang panjang.
4. Segenap dosen Program Studi Pasca Sarjana Ilmu Hukum beserta jajarannya yang telah membantu dalam proses pengajaran hingga terselesainya tesis ini.
5. Ayahanda Eddy Akhmad Yatiman dan Ibunda Evy selaku kedua orang tua penulis yang telah banyak mengorbankan pikiran, hati, tenaga, waktu, dan hartanya untuk mendidik serta memotivasi penulis untuk menyelesaikan amanah studi dengan baik.

6. Dita Puspita selaku kakak kandung penulis, yang selalu memberikan masukan serta motivasi kepada penulis sehingga penulisan tesis dan masa studi penulis penuh termotivasi .
7. Frela Fairuz Asy-Syifa, Istri tercinta yang senantiasa selalu hadir menemani dalam setiap langkah kaki ini berjalan. Selalu mendukung dan mendoakan penulis tidak hanya menyelesaikan tesis ini, dan setiap waktu.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan mereka semua dengan balasan yang sebaik – baiknya atas apa yang telah mereka berikan kepada penulis. Penulis pun menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis meminta kritik dan saran bagi para pembaca agar dikemudian hari bisa tercipta karya ilmiah yang sebaik mungkin. *Amin ya Rabbal ‘Alamin*. Terakhir, penulis sangat menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya kritik dan saran konstruktif pembaca sangatlah penulis harapkan demi perbaikan dan kebaikan tesis ini. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua, baik kalangan akademisi mausarpun penegak hukum. *Amin ya Rabbal ‘Aamin*.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Malang, 07 September 2020

RENDRA WIDYAKSO

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
Abstrak	ix
<i>Abstract</i>	x
PENDAHULUAN	1
RUMUSAN MASALAH	2
TUJUAN PENELITIAN	3
TINJAUAN PUSTAKA	3
Pengertian Peradilan Agama	3
Pengertian Aparatur Sipil Negara	4
METODE PENELITIAN	5
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	6
Konsep Pembebanan Nafkah Perceraian dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif	6
Nafkah Perceraian Dalam Pandangan Hukum Positif	16
Penerapan Isi Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Dalam Pertimbangan Majelis Hakim	24
KESIMPULAN	39
DAFTAR PUSTAKA	41
LAMPIRAN PERTIMBANGAN DAN AMAR PUTUSAN	43

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Hukum Islam	19
Tabel 2: Hukum Positif.....	21



ANALISA PELAKSANAAN PUTUSAN PERADILAN AGAMA TERHADAP NAFKAH PERCERAIAN DALAM PRESPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN HUKUM ISLAM BAGI PNS

RENDRA WIDYAKSO

rendrawidyakso1993@gmail.com

Mokh. Najih, Ph.D (NIDN. 0017056501)

Dr. Fifik Wiryani (NIDN. 0028056701)

Magister Ilmu Hukum

Direktorat Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang

Abstrak

Putusan dapat dieksekusi apabila, putusan pengadilan mengandung perintah kepada salah satu pihak untuk melakukan pembayaran sejumlah uang atau pengkosongan benda tetap. Biasanya kasus perceraian yang terjadi, akan memberikan hukuman kepada suami untuk melakukan pembayaran sejumlah uang sebagai nafkah perceraian istri setelah Hakim Pengadilan Agama memutuskan. Hukuman tersebut berupa pemberian 1/3 (sepertiga) gaji diberikan kepada mantan istri dan 1/3 (sepertiga) lainnya diberikan kepada anaknya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990, hukuman tersebut berlaku kepada suami yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dalam beberapa kasus penerapan putusan, sering sekali tidak berjalan dengan baik bahkan tidak dilaksanakan. Sehingga banyak Termohon yang menuntut Pemohon untuk memberikan sejumlah uang nafkah perceraian, seperti pembayaran nafkah *mut'ah*, nafkah *iddah*, dan nafkah *madiyah*, yang dilakukan sebelum ikrar talak diucapkan dan harus memberikan nafkah hadhanah setelah pelaksanaan ikrar talak dijatuhkan. Permohonan semacam itu akan dikabulkan oleh Majelis Hakim, namun permohonan ini tidak bagi seorang PNS. Sehingga penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode yuridis-normatif, untuk mengkaji sumber hukum pada Peraturan tersebut yang tertuang dalam putusan Pengadilan Agama. Hasil yang didapatkan bahwa majelis hakim dalam putusannya memiliki pandangan bahwa peraturan tersebut hanya sebagai syarat administratif disetiap instansi pemerintahan.

Kata Kunci: Perceraian, nafkah, dan putusan.

**ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF RELIGIOUS
JURISDICTIONS ON DIVORCE NAFKAH IN THE PERSPECTIVE
OF NATIONAL LAW AND ISLAMIC LAW FOR PNS**

RENDRA WIDYAKSO

rendrawidyakso1993@gmail.com

Mokh. Najih, Ph.D (NIDN. 0017056501)

Dr. Fifik Wiryani (NIDN. 0028056701)

Masters of Law

Directorate Postgraduate Program University of Muhammadiyah Malang

Abstract

A verdict can be executed if, the court decision contains an order for one of the parties to pay a sum of money or vacate a fixed object. Usually, a divorce case that occurs will give the husband a penalty to pay a sum of money to support the wife's divorce after the Religious Court Judge decides. The penalty is in the form of giving 1/3 (one third) of the salary given to the ex-wife and 1/3 (one third) of the other given to their children. Based on Government Regulation no. 10 of 1983 jo Government Regulation no. 45 of 1990, the sentence applies to husbands who work as Civil Servants (PNS). In some cases, the application of decisions is often not going well or not even implemented. So that many Respondents demanded the Petitioners to provide an amount of money for a divorce, such as the payment for mut' ah living, iddah livelihoods, and Nadiya livelihoods, which were made before the talk pledge was pronounced and had to provide Hashanah support after the execution of the divorce vow was dropped. Such an application will be granted by the Panel of Judges, but this application is not for a civil servant. So that the authors conducted research using the juridical-normative method, to study the source of the law in the regulation which is contained in the decision of the Religious Court. The results showed that the panel of judges in their decision had the view that the regulation was only an administrative requirement in every government agency.

Keywords: Divorce, living, and verdict.

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ajaran dan ketentuan hukum dan agama.¹ Bagi yang beragama Islam diatur khusus dalam Kompilasi Hukum Islam berbunyi bahwa Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.² Setiap pasangan suami istri tentunya mendambakan agar keluarga yang dibina dapat berjalan secara harmonis dan selalu diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Guna menjadi keluarga yang kekal, harmonis, dan bahagia harus sesuai dengan hak asasi manusia tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun dalam mencapai keluarga yang bahagia. Namun demikian banyak juga keluarga yang gagal dalam mengupayakan keharmonisannya dan berujung pada perceraian. Adapun hasil analisa dikutip dari jurnal ilmu pemerintahan dan sosial politik UMA bahwa faktor perceraian mendasar pada empat hal yakni karena faktor ekonomi, faktor usia, kurang pengetahuan agama, dan ketidak sesuaian pendapat dalam rumah tangga.³

Di Indonesia menurut data umum statistik tentang Pegawai Negeri Sipil, jumlahnya mencapai 4.286.918 per 30 Juni 2019.⁴ Dalam perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Khususnya bagi PNS yang akan bercerai harus mendapatkan izin dari atasan. Kewajiban tersebut berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, baik sebagai Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon. Perizinan tersebut akan memiliki konsekuensi hukum atas perceraian yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil, konsekuensi yang didapat yakni pembagian 1/3 gaji yang diberikan kepada mantan isterinya, 1/3 bagian untuk anaknya, dan 1/3 untuk dirinya sebagaimana diatur pada Pasal 8, namun dalam praktiknya izin dari

¹ WJS Purwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2008

² Kompilasi Hukum Islam

³ Dikutip dari Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA “Faktor-Faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan”

⁴ Dikutip dari website Badan Kepegawaian Negara, bkn.go.id, pada Senin, 25 Desember 2019, pukul 20.00 WIB

atasan hanya menjadi syarat administratif dalam mengajukan perkara perceraian di Pengadilan dan tidak berdampak pada putusan atas pembagian gaji sebagaimana diatur dalam Pasal tersebut. Dalam hal ini berarti bahwa mantan suami memiliki kewajiban untuk menyerahkan 1/3 bagian gajinya mulai dari putusan disahkan hingga sang istri menikah lagi. Tentunya hal ini bertentangan dengan Hukum Islam, dimana di anggap sebagai pembebanan nafkah secara khusus. Hukum Islam mengatur dalam perkara cerai talak sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 149 Kompilasi, seorang suami yang telah mentalak istrinya diwajibkan untuk memberikan nafkah *mut'ah*, nafkah *iddah*, melunasi mahar yang masih terhutang, dan memberikan biaya *hadhanah*.

Sedangkan dalam perkara cerai gugat diperkenankan bagi isteri (Penggugat) mengajukan tuntutan nafkah perceraian sebagaimana hasil pleno kamar agama yang dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018. Hal ini pun Islam tidak mengatur batasan waktu pemberian nafkah perceraian. Hanya saja berdasarkan *ijtihad* bahwa nafkah *iddah* hanya diberikan selama 3 (tiga) kali selama masa suci mantan isteri, dan nafkah *madiyah* (terutang) diberikan sejak mantan suami tidak menafkahnya. Pernyataan ini angat berbeda dengan Peraturan Pemerintah sehingga muncul perbedaan pendapat antara Hakim tentang penggunaan Peraturan Pemerintah. Hal ini dikarenakan tidak sesuai dengan Hukum Islam dan teori kemaslahatan, oleh karena itu, penulis berusaha untuk menggali pertimbangan Majelis Hakim Peradilan Agama dalam memutus perkara perceraian dengan konsekuensi pembebanan nafkah perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep pembebanan nafkah perceraian dalam pandangan Hukum Nasional dan Hukum Islam?
2. Bagaimana penerapan Pasal 8 Peraturan Pemerintah.No.. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan. Atas Peraturan Pemerintah No.: 10 Tahun 1983 tentang Izin Pekawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dalam pertimbangan Majelis Hakim?

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep pembebanan nafkah perceraian baik menurut hukum Islam maupun hukum nasional. Selain itu bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan bercerai telah diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dapat mengetahui bagaimana pandangan Majelis Hakim Peradilan Agama menuangkannya dalam pertimbangan putusan pengadilan

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Peradilan Agama.

Peradilan Agama merupakan salah satu institusi negara dalam lembaga yudikatif yang menegakkan Kekuasaan Kehakiman. Secara etimologi peradilan berasal dari kata adil dengan awalan “*per*” dan akhiran “*an*”, memiliki arti sebagai sesuatu hal yang berhubungan dengan keadilan.⁵ Menurut bahasa arab, keadilan disebut sebagai “*al qadla*” yang memiliki arti mengakhiri, menyelesaikan, menunaikan dan memerintahkan. Secara terminologis peradilan disebut sebagai “*fashlun filklusmati hasman littadai wa waqt’an linnizaa’i bil ahkaamisy syar’iyyati almutalaqqati minal kitaabiwas sunnati*”.

Merupakan suatu urusan atau tugas untuk menyelesaikan persengketaan untuk menghentikan gugat menggugat dan menghentikan pertengkaran dengan hukum-hukum. Atau bisa juga di artikan tugas untuk menyelesaikan sengketaan hukum dan pelanggaran hukum untuk mencapai keadilan, ketertiban, kebenaran dan kepastian hukum. Peradilan Agamaa memiliki kekhususan daripada peradilan lainnya, karena hanya membahas tentang hukum kekeluargaan seperti perkawinan, perceraian dan kewarisan, selain itu juga membahas tentang hukum perikatan seperti wasiat, wakaf, hibah, dan shadaqah.

Peradilan ini sangat berbeda karena hanya mengadili perkara – perkara tertentu seperti Hukum materiil agama Islam. Selain itu juga mengadili golongan perdata bagi

⁵Poewardarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, 1980, Hlm. 15

rakyat yang beragama islam.⁶ Peradilan Islam di Indonesia sudah ada sejak sejak jaman penjajahan Belanda sekitar abad ke 16 (enam belas). Sejarah peradilan islam di tetapkan pada tanggal 19 Januari 1882, yang bersamaan dengan diundangkannya *ordonantie Stbl* tentang Peradilan Agama di Pulau Jawa dan Madura.⁷ Salah satu tugas Pengadilan Agama yaitu menerima, memeriksa dan memutus perkara perceraian, yang disebutkan dalam Pasal 38. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai ketentuan fakultatif. Berdasarkan Hukum Islam perceraian memiliki 2 jenis yakni: Cerai Talak, merupakan perceraian diajukan dan dijatuhkan oleh suami dan ditetapkan oleh Majelis Hakim melalui putusan pengadilan. Selanjutnya yaitu Cerai Gugat (*khulu'*), merupakan keinginan istri untuk cerai dengan alasan perkawinannya tidak dapat dipertahankan.

Pengertian Aparatur Sipil Negara.

Pasal 1 PP Nomor 10 Tahun 1983 menjelaskan bahwa PNS sama dengan penjelasan dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Kepegawaian *juncto*, dimana undang-undang tersebut berubah menjadi Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok Kepegawaian yang memiliki arti, seorang warga yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi pejabat berwenang dan diberi tugas selama masa jabatan yang akan mendapatkan gaji sesuai undang – undang yang berlaku.⁸ Pegawai Negeri Sipil yang akan bercerai diatur dalam PP Nomor 10 Tahun 1983. yang berubah menjadi PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS. Peraturan tersebut diberlakukan khusus bagi PNS yang akan melakukan. Perkawinan lagi (poligami) dan yang akan melakukan perceraian. Peraturan tersebut berlaku berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Peraturan Perundang – Undangan merupakan suatu penjabaran dari asas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni asas yang mempersulit proses hukum perceraian, asas kepastian pranata, lembaga hukum perceraian, dan atas perlindungan hukum selama dan setelah perceraian.

⁶ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014, Hlm. 27

⁷ A.Rasyid Roihan. *Hukum acara Peradilan Agama*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hlm. 1

⁸ Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian

2. Pertimbangan Sosial, menjadikan asas untuk mempersulit perceraian, dimana seorang Pegawai Negeri Sipil digarapkan memberikan contoh yang baik bagi bawahannya dan dapat menjadi panutan bagi masyarakat.
3. Pertimbangan Institusional, merupakan upaya untuk meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara dalam melakukan perkawinan dan perceraian, yang mengacu pada sikap atau kondisi dalam menunjukkan ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, merupakan penelitian yang dilakukan oleh seseorang dengan sasaran penelitian yang terbatas, walaupun sasaran penelitian ini terbatas, tetapi data yang digali sangat mendalam dan berkualitas. Analisis isi (*content analysis*) pada penelitian kualitatif lebih penting daripada symbol atau atribut seperti pada penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif memerlukan ketajaman analisis, objektifitas, dan sistematis, sehingga diperoleh ketepatan dalam interpretasi. Sebab hakikat dari suatu fenomena atau gejala bagi penganut penelitian kualitatif adalah totalitas atau *gestalt*.⁹ Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis-normatif, merupakan suatu cara yang digunakan dalam suatu penelitian yang menggunakan asas-asas, serta peraturan perundang-undangan guna meninjau, melihat serta menganalisa permasalahan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data undang-undang yang diperoleh dari Peradilan Agama di Semarang. Selain itu penelitian ini menggunakan data sekunder meliputi buku, artikel, makalah, jurnal hukum Islam, majalah, koran online dan lain sebagainya. Selain itu penelitian ini juga melakukan penelitian lapang (*field research*), hal itu dikarenakan data yang diperoleh dari studi pustaka kurang cukup. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa, membaca literatur yang berkaitan (*Library Research*), selain itu penelitian ini juga menggunakan teknik (*Field Research*), yaitu mengamati dan mengumpulkan data secara langsung dari lapangan, dengan menggunakan proses interview dan dokumentasi lapangan.

⁹ Dra. Nurul Zuriah, M.Si, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: 2009), hlm. 92

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konsep Pembebanan Nafkah Perceraian dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif.

1. Nafkah Perceraian dalam Pandangan Hukum Islam.

Nafkah secara bahasa berasal dari kata **نَفَقَ - يَنْفِقُ - نَفَقَةٌ** yang artinya belanja atau biaya. Secara terminologis, nafkah diartikan sebagai sesuatu yang mencukupi, berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal bagi yang menanggungnya. Nafkah merupakan suatu hal yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap isteri dan anak-anaknya. Sebagaimana dijelaskan dalam QS At-Thalaq ayat 7 bahwa:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.

Maksud daripada ayat di atas menegaskan bahwa seorang suami memiliki kewajiban dalam memberi nafkah atau pembelanjaan untuk isteri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya. Namun dalam hal ini tidak ada ketentuan berapa besar kewajiban seorang suami dalam memberikan nafkah kepada isteri dan anak – anaknya. Adapun menurut beberapa ulama’ mendefenisikan tentang nafkah sebagai berikut:

- a. Para fuqoha mendefenisikan nafkah sebagai biaya yang wajib hukumnya dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya meliputi sandang, pangan, dan papan termasuk kebutuhan sekunder seperti kebutuhan rumah tangga lainnya;

b. Adapun menurut al-Sayid Sabiq dalam bukunya nafkah didefinisikan sebagai kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan istri, bagi seseorang yang kaya.¹⁰

Berdasarkan dari definisi dan pandangan para ulama' dapat disimpulkan bahwa definisi nafkah adalah sesuatu yang dibelanjakan oleh seseorang untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain dalam hal ini keluarga yakni isteri dan anak baik berupa makanan, minuman, pakaian, perumahan, dan kebutuhan lainnya. Sehingga nafkah tersebut merupakan suatu hal yang mempunyai nilai manfaat atau nilai materi yang diberikan oleh suami kepada isteri dan anak-anaknya.

Secara Hukum Islam, nafkah diatur dalam Al-Qur'an QS Al - Baqarah ayat 233 yang bunyinya:

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا وَلَدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas

¹⁰ Syuhada, Analisis Tentang Konsekuensi Yuridis Harta Bersama Terhadap Kewajiban Suami Memberi Nafkah dalam KHI, Vol. 1 No. 1 (Mei, 2013), Hlm. 52

keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa ada bentuk kewajiban nafkah yang hanya diberikan kepada yang berhak, seorang suami terhadap isterinya. Dalam hal ini memberikan sesuatu tersebut berdasarkan dengan kebutuhan bukan menentukan jumlah nafkah yang harus diberikan. Tidak diatur sedemikian rupa, dikarenakan adanya kekhawatiran terjadinya pemborosan penggunaan dalam suatu keadaan tertentu.

Adapun dalam suatu riwayat Hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Nasa’i, dan Ibnu Majah menyebutkan bahwa:

وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! مَا حَقُّ زَوْجٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ ؟ قَالَ : تُطْعِمُهَا إِذَا أَكَلْتَ ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ ، وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ ، وَلَا تُقَبِّحْ ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ . (رواه أحمد ، أبو داود ، نسائي ، ابن ماجه).

Artinya : *Dari Hakim bin Muawiyah, dari ayahnya dia berkata, “Aku bertanya, Wahai Rosulullah, apakah kewajiban kami terhadap istrinya? Beliau menjawab, “Engkau memberikannya makan jika engkau makan, engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian, jangan memukul muka, jangan menjelek-jelekan, dan jangan berpisah (dari tempa tidurnya), kecuali didalam rumah.” (HR. Ahmad, Abu Daud, Nasa’i, Ibnu Majah)¹¹*

Hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Nasa’i, dan Ibnu Majah menerangkan bahwa nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada isterinya berupa:

- a. Memberi nafkah baik berupa sandang, pangan, dan papan;
- b. Tidak menyakiti isteri;

¹¹ Mardani, *Hadist Ahkam*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, Hlm. 245

c. Memberikan nafkah batin.

Para fuqoha sepakat berpendapat bahwa memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anaknya hukumnya wajib, kecuali seorang isteri tersebut telah melakukan nusyuz. Ulama' Fikih juga sependapat bahwa nafkah yang harus dikeluarkan adalah berupa kebutuhan pokok seperti makan, pakaian, dan tempat tinggal. Para ulama' fikih membagi nafkah atas dua macam yakni:

1. Nafkah untuk dirinya sendiri;

Dianjurkan seseorang tersebut untuk mendahulukan nafkah untuk dirinya sendiri daripada nafkah kepada orang lain, sebagaimana Hadist yang disabdakan oleh Rasulullah SAW sebagai berikut:

إِبْدَأْ بِنَفْسِكَ ثُمَّ بِمَنْ تَعُولُ

Artinya: “Mulailah dengan dirimu, kemudian bagi orang yang berada dibawah tanggungjawabmu” (HR. Muslim, Ahmad bin Hambal, Abu Daud, dan An Nasa’i dari Jabir bin Abdullah)¹²

2. Nafkah seseorang terhadap orang lain

Ulama fiqih sepakat bahwa ada dua hal yang menyebabkan terjadinya kewajiban memberikan nafkah, yakni:¹³

a. Hubungan perkawinan;

Diwajibkan bagi seorang suami memberi nafkah kepada isterinya yang tidak nusyuz baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lainnya menurut keadaan dan ditempat masing – masing menurut kemampuan suami.

b. Hubungan kekerabatan;

Hubungan kekeluargaan yaitu bapak atau ibu dan yang masih memiliki hubungan kerabat lainnya.

Berkaitan dengan nafkah, Islam tidak hanya mengatur kewajiban memberikan nafkah kepada isteri dan anak – anaknya yang masih dalam perkawinan, namun Islam juga mengatur hal – hal yang wajib bagi seorang mantan suami

¹² Beni Ahmad Saebani, Fikih Munakahat (buku II), Pustaka Amani, Bandung, 2001, Hlm. 104

¹³ Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid ke 4, Ictiar Baru Van Hoeven, Jakarta, 2009, Hlm 1281

memberikan nafkah kepada isteri dan anak – anaknya pasca perceraian. Hal ini mendasar pada Q.S At-Thalaq ayat 7 bahwa:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا

ءَاتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.¹⁴

Dalam Hadits disebutkan:

خُذِي مِمَّا يَفِيكَ وَ لَدَيْكَ بِإِلْمِ غُرُوفٍ

Yang artinya: “Ambillah (dari harta suamimu) apa yang mencukupimu dan anak-anakmu dengan cara yang baik”¹⁵

Sehingga dari kedua dasar hukum yang diterangkan dalam Al-Qur'an maupun Hadits menjadi konsekuensi kewajiban bagi suami untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Mengingat bahwa selama masih menjadi suami istri yang sah menurut hukum dan agama hukumnya wajib menafkahi. Adapun dengan anak bahwa dari berbagai pandangan manapun tidak memutus hubungan darah antara anak dengan orang tuanya jika terjadi perceraian.

Perceraian kerap terjadi khususnya di Indonesia, yang mana dari segi pihak yang mengajukan dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yakni cerai talak dan cerai gugat.

1. Cerai talak didefinisikan dalam Pasal 114 KHI bahwa: “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian” lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 129 KHI yang berbunyi:

¹⁴ Al-Qur'an Terjemahan Q.S At-Thalaq ayat 7

¹⁵ HR Bukhari dan Muslim dan selain keduanya.

“seseorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”

2. Cerai Gugat didefinisikan dalam Pasal 132 ayat 2 yang berbunyi: “Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami”¹⁶

Dengan adanya dua klasifikasi jenis perkara perceraian yang dapat diajukan di Pengadilan Agama memiliki konsekuensi masing-masing. Khususnya terhadap konsekuensi pembebanan nafkah terhadap perkara perceraian.

Adapun nafkah perceraian yang diatur dalam Hukum Islam adalah sebagai berikut:

a. Nafkah Iddah

Agama Islam mengatur tentang nafkah pasca perceraian atau disebut dengan nafkah iddah berdasarkan pada ayat Al – Qur’an dan hadist sebagaimana berikut dalam Surah Q.S At – Thalaq ayat 1 yang bunyinya:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Artinya: Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji

¹⁶ Instruksi Presiden RI Nomor: 1 Tahun 1991 - Kompilasi Hukum Islam

yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.

Selain itu dijelaskan dalam Q.S At – Thalaq ayat : 6 yang bunyinya:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٍ
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ^ط وَأَتِمُّوا^ط بَيْنَكُمْ
بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسُرِّضْ لَهُ^ط أُخْرَى ۚ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Dalam Hadist riwayat An – Nasa’i disebutkan:

Dari Fatimah bib Qays, ia berkata: “Aku menemui Nabi SAW, dan menjelaskan bahwa aku adalah anak dari keluarga Khalid. Suamiku, si Fulan, mengutus seseorang kepadaku untuk menyampaikan talaknya. Aku menuntut kepada keluarganya hakku terhadap nafkah dan tempat tinggal. Mereka mengabulkannya. Mereka menjelaskan kepada Rasulullah bahwa “Suaminya telah menyampaikan talak sebanyak tiga kali” Fathimah berkata lagi “Rasulullah SAW bersabda: “Hak nafkah dan tempat tinggal hanya dimiliki oleh seorang perempuan apabila suaminya masih memiliki hak rujuk kepadanya.” (H.R An –Nasa’i)¹⁷.

¹⁷ Ahmad bin Syu'aib Abu 'Abd al-Rahman al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'iy-al-Mujtabi*, (Halab: Maktab al-Mathbu'at al-Islamiyyah, 1986), Juz 6. h. 144. Lihat juga: Ahmad bin al-Husain bin 'Ali bin Musa Abu Bakar al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*, (Makkah al-Mukarramah: Maktabah Dâr al-Baz, 1994), Juz 7, hlm. 474. Muhammad bin 'Ali bin Muhammad al-Syaukani, *Nail al-Authâr min Ahâdîts Said al-Akhhbâr Syarh Muntaqa al-Akhhbâr*, (t.tp: Idarah al-Thaba'ah al-Minbarah, t.th.), Juz 7, hlm. 103 dan 108.

Maka berdasarkan ayat Qur'an dan Hadist di atas para ulama sepakat mengatakan bahwa bagi perempuan yang dijatuhkan talak raj'i memiliki hak untuk memperoleh nafkah iddah dan tempat tinggal.¹⁸ Adapun dalam kitab Wahbah Al – Zuhaili Fiqh Al – Islam wa Adillatuh terhadap perempuan yang dijatuhkan talak ba'in para ulama sepakat apabila perempuan tersebut dalam keadaan hamil, maka dia berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal.¹⁹

Sedangkan bagi perempuan – perempuan yang dijatuhkan talak ba'in tetapi tidak dalam kondisi hamil maka terdapat pendapat yang berbeda bagi para ulama, yakni:

1. Pendapat Ulama Syafi'iyah dan Malikiyah²⁰;

Berpendapat bahwa perempuan yang dijatuhkan talak ba'in dalam keadaan tidak hamil, haknya hanya mendapatkan tempat tinggal dan tidak mendapatkan hak nafkah. Tempat tinggal yang dimaksud mengacu pada ayat 6 surat At – Thalaq pada kalimat “*askinuhunna*” (berikanlah mereka tempat tinggal).²¹ Sedangkan dengan tidak dapatnya nafkah dikaitkan dengan kondisinya yang tidak sedang hamil maka tidak ada kewajiban atas nafkah tersebut.

2. Pendapat Ulama Hanabilah²² dan Zhahiriyyah;

Keduanya berpendapat bahwa tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Dasar dari pendapat ini adalah hadist yang diriwayatkan oleh An – Nasa'i di atas yang mengatakan bahwa Fatimah binti Qais telah ditalak tiga kali oleh suaminya. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepada Fatimah engkau tidak ada hak nafkah dari suaminya. Pendapat ini juga merupakan pendapat dari Ibnu Abbas, Jabir bin Abdullah, sebagian Tabi'imn dan Ishaq.²³

'Ali bin 'Umar Abu al-Hasan al-Daruquthni, *Sunan al-Daruquthniy*, (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1966), Juz 4, hlm. 22

¹⁸ Muhammad bin Ibrahim Ibn Al – Munzir Al – Naisabury, Loc Cit

¹⁹ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh al-Islâmi wa Adillatuh*. (Dar al-Fikr, Beirut, 1998), Juz 7, hlm. 658. Lihat juga dalam: Ahmad bin Ghanim bin Salim al-Nafrawiy al-Malikiy, *al-Fawakih al-Diwaniy*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1415 H), Juz 2, hlm. 63

²⁰ Malik bin Anas, Al – Mudawwamat al – Kubra, Beirut, Dar al – Fikr al – Arabi, juz 4, Hlm. 189

²¹ Ahmad bin Muhmmad al – Dardiri, al – Syarh al – Shaghir Juz. 2, Hlm. 740

²² Muwaffiq al – Din Ibnu Qudamah, al- Mughny, Kuwait, Dar Alim al – Kutu, 1997, juz 11, Hlm. 606

²³ Wahbah al – Zuhaili, Tafsir al – Munir, Beirut, Dar al – Fikr, 2008, juz 28 Hlm. 674

3. Pendapat Ulama Hanafiyah²⁴

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa istri yang dijatuhi talak ba'in tetap memiliki hak atas nafkah dan *maskan* (tempat tinggal) seperti perempuan yang dijatuhi talak raj'i berdasarkan ayat 6 dari surat At – Thalaq. Menurut beliau bahwa esensi yang terkandung dalam ayat tersebut adanya perintah tentang wajibnya memberikan tempat tinggal yaitu pada kalimat *askinuhunna* (berikanlah mereka tempat tinggal) dan isteri yang ditalak ba'in tersebut wajib menghabiskan masa iddah di rumah suaminya. Hal ini dikarenakan suaminya masih ada hak kepadanya berupa kepastian ada atau tidaknya pembuahan dalam rahim sehingga dianggap wajar perempuan tersebut mendapatkan haknya berupa nafkah. Adapun maksud nafkah dalam ayat tersebut yang dikaitkan dengan kehamilan, dikarenakan iddah hamil adalah iddah yang paling lama sehingga perlu ditegaskan sedangkan untuk masa iddah yang lebih pendek dari itu telah tercakup di dalamnya. Sehingga nafkah tersebut dianggap hutang yang resmi sejak dijatuhkannya talak dan tidak dapat dihapuskan kecuali sudah dibayarkan.²⁵

b. Nafkah Mut'ah

Tafsir as – Sabuni mengartikan bahwa nafkah dimaknai sebagai Mut'ah, yang artinya pemberian seorang suami kepada isterinya yang telah diceraikan, baik berupa uang, pakaian, atau berupa pembekalan lainnya sebagai bantuan dan bentuk penghormatan kepada isterinya sehingga dapat menghindarkan kemudharatan talak yang dijatuhkannya.

Selain itu, makna daripada mut'ah diartikan sebagai penghibur, namun dalam hal ini harus disesuaikan dengan kemampuannya sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah SWT Q.S Al – Baqarah ayat 241 yang bunyinya:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

²⁴ Abu Bakar bin Mas'ud al – Kasany, Al – bada'i al – Shana'i. Beirut: Dar al – Kutub al – Ilmiyah, 2010, Juz 4, Hlm. 16

²⁵ Sayyid Sabiq, Fiqh al – Sunnah, Kairo, al – Fath li al – A'lam al – Arabiy, Juz. 2, Hlm. 216

Artinya: “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.

Menurut ayat tersebut, *Mut'ah* (pemberian) diartikan sebagai sesuatu yang diberikan oleh suami kepada isteri yang diceraikannya sebagai penghibur, selain nafkah sesuai dengan kemampuannya. Intinya ayat tersebut merupakan perwujudan mendapatkan persesuaian kepada Hukum Islam bahwa dalam hal ini nafkah setelah nafkah iddah tersebut telah habis. Tujuan pemberian *Mut'ah* seorang suami terhadap isteri yang telah diceraikannya adalah dengan adanya pemberian tersebut diharapkan dapat menghibur atau menyenangkan hati isterinya tersebut.

Selain itu untuk membersihkan hati dan fikiran kaum wanita dan menghilangkan kekhawatiran terhadap penghinaan kaum pria terhadapnya.²⁶ Keharusan memberi *mut'ah*, yaitu pemberian suami kepada istri yang diceraikannya sebagai suatu kompensasi. Hal ini berbeda dengan *mut'ah* sebagai pengganti mahar bila istri di cerai sebelum digauli dan sebelumnya jumlah mahar tidak ditentukan, tidak wajib suami memberi mahar, namun diimbangi dengan suatu pemberian yang bernama *mut'ah*. Dalam kewajiban memberi *mut'ah* itu terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, golongan zhahiriyyah berpendapat bahwa *mut'ah* itu hukunya wajib. Dasarnya ialah firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 241, ialah sebagai berikut :

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتْعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

Artinya :*"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa."*²⁷

²⁶ Drs. H. Abd.Rahman Ghazaly, M.A. *Fiqih Munakahat*, Jakarta Timur, Prenanda Media, 2003, Hlm 92 – 93.

²⁷ Departemen Agama R.I *Al-Qur'an dan Terjemah*, Hlm 59

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *mut'ah* itu hukumnya sunnah, karena kalimat *haqqan 'ala> al-muttaqi>n* di ujung ayat tersebut menunjukkan hukumnya adalah tidak wajib, kewajiban *mut'ah* itu berlaku dalam keadaan tertentu.

- c. Melunasi utang yang wajib dibayarnya dan belum dibayarnya selama masa perkawinan, baik dalam bentuk mahar atau nafkah, yang menurut sebagian ulama wajib dilakukannya bila ada waktunya dia tidak dapat membayarnya. Begitu pula mahar yang belum dibayar atau dilunasinya, harus dilunasinya setelah bercerai.
- d. Pemeliharaan terhadap anak atau *hadhanah*.²⁸

Nafkah Perceraian Dalam Pandangan Hukum Positif

Hukum positif juga mengatur tentang nafkah pasca perceraian. Sebelum adanya Kompilasi Hukum Islam yang dituangkan dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menjelaskan dalam Bab VIII Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya. Dalam Pasal 41 menjelaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Merujuk pada pasal tersebut dalam Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa akibat putusnya perkawinan mengatur tentang kewajiban dan tanggungjawab bapak atau ibu dari anak atau anak – anaknya dalam memberikan pemeliharaan, pendidikan, dan kasih sayang semata – mata berdasarkan atas kepentingan anak. Berkaitan dengan biaya dalam hal ini menjadi tanggungjawab

²⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fikih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Hlm 303

keduanya, meskipun bilamana ada perselisihan maka Pengadilan berhak untuk menentukan kepada siapa kewajiban tersebut diberikan. Dan dalam huruf c pasal tersebut menyatakan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Adapun dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa :
“Bilamana perkawinan putus karena cerai talak maka bekas suami wajib:

- a. memberikan mut`ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
- d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Berbeda dengan aturan bagi Pegawai Negeri Sipil yang bercerai sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mana sebelum mengajukan perkara perceraian di Pengadilan, maka syaratnya bagi suami atau isteri yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil baik kedudukannya sebagai Penggugat atau Tergugat harus mendapatkan izin atasan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang bunyinya

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat;
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh izin

atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;²⁹

Tidak hanya mengatur tentang syarat administrasi berupa izin atasan, dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil juga mengatur tentang kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil pria pasca diputus perkawinannya oleh Pengadilan. Dalam hal ini disebutkan di dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil menyebutkan:

- (1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya;
- (2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya;
- (3) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas isterinya ialah setengah dari gajinya;
- (4) Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzinah, dan atau melakukan kejahatan atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pematat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- (5) Apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya;
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak berlaku, apabila istri minta cerai karena dimadu, dan atau suami berzinah, dan atau suami melakukan kejahatan atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri, dan atau

²⁹ Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

suami menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

- (7) Apabila bekas isteri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi;

Baik Hukum Islam dan ketiga dasar hukum positif tersebut terdapat hal – hal yang membedakan diantaranya:

Tabel 1 Hukum Islam

HUKUM ISLAM		
DASAR HUKUM	JENIS NAFKAH	PEMBAGIAN
<ul style="list-style-type: none"> ● Q.S At – Thalaq ayat 1; ● Q.S At – Thalaq ayat : 6; ● Dalam Hadist riwayat An – Nasa'i disebutkan: Dari Fatimah bib Qays, ia berkata: “Aku menemui Nabi SAW, dan menjelaskan bahwa aku adalah anak dari keluarga Khalid. Suamiku, si Fulan, mengutus seseorang kepadaku untuk menyampaikan talaknya. Aku menuntut kepada keluarganya hakku terhadap nafkah dan tempat tinggal. Mereka mengabulkannya. Mereka menjelaskan kepada Rasulullah bahwa “Suaminya telah menyampaikan talak sebanyak tiga kali” Fathimah berkata lagi “Rasulullah SAW bersabda: “Hak nafkah dan tempat tinggal hanya dimiliki oleh seorang perempuan apabila suaminya masih memiliki hak rujuk kepadanya.” (H.R An – Nasa’I 	Nafkah Iddah	<ul style="list-style-type: none"> ● Pendapat Ulama Syafi’iyah dan Malikiyah: Berpendapat bahwa perempuan yang dijatuhkan talak ba’in dalam keadaan tidak hamil, haknya hanya mendapatkan tempat tinggal dan tidak mendapatkan hak nafkah. Tempat tinggal yang dimaksud mengacu pada ayat 6 surat At – Thalaq pada kalimat “<i>askinuhunna</i>” (berikanlah mereka tempat tinggal).Sedangkan dengan tidak dapatnya nafkah dikaitkan dengan kondisinya yang tidak sedang hamil maka tidak ada kewajiban atas nafkah tersebut ● Pendapat Ulama Hanabilah dan Zhahiriyyah: Keduanya berpendapat bahwa tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Dasar dari pendapat ini adalah hadist yang diriwayatkan oleh An – Nasa’i di atas yang mengatakan bahwa Fatimah binti Qais telah ditalak tiga kali oleh suaminya. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepada Fatimah engkau tidak ada hak nafkah dari suaminya. Pendapat ini juga merupakan pendapat dari Ibnu Abbas, Jabis bin Abdillah, sebagian Tabi’imn dan Ishaq ● Pendapat Ulama Hanafiyah: Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa istri yang dijatuhi talak ba’in tetap memiliki hak atas

nafkah dan *maskan* (tempat tinggal) seperti perempuan yang dijatuhi talak raj'i berdasarkan ayat 6 dari surat At – Thalaq. Menurut beliau bahwa esensi yang terkandung dalam ayat tersebut adanya perintah tentang wajibnya memberikan tempat tinggal yaitu pada kalimat *askinuhunna* (berikanlah mereka tempat tinggal) dan isteri yang ditalak ba'in tersebut wajib menghabiskan masa iddah di rumah suaminya. Hal ini dikarenakan suaminya masih ada hak kepadanya berupa kepastian ada atau tidaknya pembuahan dalam rahim sehingga dianggap wajar perempuan tersebut mendapatkan haknya berupa nafkah. Adapun maksud nafkah dalam ayat tersebut yang dikaitkan dengan kehamilan, dikarenakan iddah hamil adalah iddah yang paling lama sehingga perlu ditegaskan sedangkan untuk masa iddah yang lebih pendek dari itu telah tercakup di dalamnya. Sehingga nafkah tersebut dianggap hutang yang resmi sejak dijatuhkannya talak dan tidak dapat dihapuskan kecuali sudah dibayarkan

Q.S Al – Baqarah ayat 241

Nafkah Mut'ah

Menurut ayat tersebut, Mut'ah (pemberian) diartikan sebagai sesuatu yang diberikan oleh suami kepada isteri yang diceraikannya sebagai penghibur, selain nafkah sesuai dengan kemampuannya. Intinya ayat tersebut merupakan perwujudan mendapatkan persesuaian kepada Hukum Islam bahwa dalam hal ini nafkah setelah nafkah iddah tersebut telah habis. Tujuan pemberian Mut'ah seorang suami terhadap isteri yang telah diceraikannya adalah dengan adanya pemberian tersebut diharapkan dapat menghibur atau menyenangkan hati isterinya tersebut. Selain itu untuk membersihkan hati dan fikiran kaum wanita dan menghilangkan kekhawatiran terhadap penghinaan kaum pria terhadapnya

- golongan zhahiriyah berpendapat bahwa *mut'ah* itu hukunya wajib;
- Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *mut'ah* itu hukumnya

sunnah, karena kalimat *haqqan 'ala> al-muttaqi>n* di ujung ayat tersebut menunjukkan hukumnya adalah tidak wajib, kewajiban *mut'ah* itu berlaku dalam keadaan tertentu

Melunasi utang yang wajib dibayarnya dan belum dibayarnya selama masa perkawinan
 Dalam bentuk mahar atau nafkah, yang menurut sebagian ulama wajib dilakukannya bila ada waktunya dia tidak dapat membayarnya. Begitu pula mahar yang belum dibayar atau dilunasinya, harus dilunasinya setelah bercerai
 Pemeliharaan terhadap anak atau *hadhanah*
 Tidak diatur besarannya;

Tabel 2 Hukum Positif

HUKUM POSITIF			
DASAR HUKUM	KETENTUAN PEMBERLAKUAN DAN IZIN ATASAN	JENIS NAFKAH	PEMBAGIAN
Pasal 41 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Untuk warga Indonesia yang beragama non muslim Tidak diatur mengenai izin atasan	Tidak dijelaskan jenis nafkah, namun penekanan tentang kewajiban memelihara anak, pendidikan serta pengadilan dapat mewajibkan memberikan biaya penghidupan bekas isteri	<p>a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;</p> <p>b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;</p> <p>c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau</p>

<p>Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam</p>	<p>Untuk warga Indonesia yang beragama muslim; Tidak diatur mengenai izin atasan</p>	<p>Mut'ah</p>	<p>menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri; Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul</p>
		<p>Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah</p>	<p>Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil</p>
		<p>Melunasi mahar yang masih terhutang</p>	<p>Melunasi mahar yang masih terhutang</p>
		<p>Biaya hadhanah</p>	<p>Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul</p>
<p>Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Untuk warga Indonesia yang beragama muslim dan non muslim ● Harus menggunakan izin atasan setiap instansi pemerintahan 	<p>Pembagian gaji untuk mantan isteri dan anak atau anak-anaknya</p>	<p>Memeberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun</p>
			<ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya; 2. Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya; 3. Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas isterinya ialah setengah dari gajinya; 4. Pembagian gaji

kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzinah, dan atau melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

5. Apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya;

6. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak berlaku, apabila istri minta cerai karena dimadu, dan atau suami berzinah, dan atau suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri, dan atau suami menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau

- karena hal lain diluar kemampuannya;
7. Apabila bekas isteri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi;
-

Penerapan Isi Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Dalam Pertimbangan Majelis Hakim

1. Konsekuensi Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

Perceraian merupakan keputusan tali perkawinan antara suami dan isteri. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 207 KUHPerdata disebutkan bahwa: perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam undang-undang. Menurut Subekti dalam bukunya perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.³⁰ Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi:³¹

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

³⁰ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa, 1983, Hlm.23

³¹ Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Mengingat sebagaimana berdasarkan Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama bahwa salah satu kewenangannya mengadili perkara perceraian.

Pada umumnya bagi pihak yang mendaftarkan perceraian di Pengadilan Agama harus memenuhi syarat setidaknya adalah gugatan atau permohonan dan fotokopi buku nikah yang telah dinazegelen di kantor Pos Indonesia. Berbeda dengan Pegawai Negeri Sipil yang secara administratif harus melampirkan izin dari atasan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang bunyinya:³²

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat;
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;
- (3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan, harus dicantumkan alasan yang lengkap dan mendasarinya;

Sehingga menjadi suatu kewajiban syarat yang harus dipenuhi baik bagi Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon untuk melampirkan izin atasan. Yang mana izin atasan tersebut harus dilampirkan secara tertulis dengan memuat alasan Pegawai Negeri Sipil tersebut dan pertimbangan atasan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, bahwa:

- (1) Setiap atasan yang menerima permintaan izin Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian atau untuk beristeri lebih dari

³² Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

seorang, maupun untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud;

Pertimbangan atasan yang diberikan izin untuk melakukan perceraian sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut:³³

- (1) Izin untuk bercerai dapat diberikan oleh Pejabat apabila didasarkan pada alasan-alasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini;
- (2) Izin untuk bercerai karena alasan isteri mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, tidak diberikan oleh Pejabat;
- (3) Izin untuk bercerai tidak diberikan oleh Pejabat apabila
 - a. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
 - b. tidak ada alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
 - c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
 - d. alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat

Dan apabila berdasarkan alasan di atas, atasan merasa kurang yakin dengan pernyataannya Pegawai Negeri Sipil tersebut maka Pejabat diperbolehkan memintai keterangan tambahan dari suami/isteri dari Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permintaan izin atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang menyakinkan.

Hal ini tidak menutup kemungkinan pelaksanaan atas asas mempersulit perceraian yang merupakan asas hukum yang terdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam angka 4 huruf e

³³ Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

yang menyatakan bahwa pada prinsipnya Undang-Undang Perkawinan ini menganut asas mempersulit perceraian yang memungkinkan terjadinya perceraian jika perceraian itu dilakukan dihadapan Pengadilan dan berdsarkan alasan-alasan tertentu. Adapun tujuannya tidak lain adalah mengutuhkan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.³⁴

Dalam hal perkara perceraian tentunya memiliki konsekuensi hukum yang berlaku. Pada perkara cerai talak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 140 KHI mewajibkan bekas suami untuk memberikan nafkah mut'ah, nafkah madiyah, nafkah iddah, dan nafkah anak. Dan untuk perkara cerai gugat sebagaimana SEMA Nomor: 3 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama dibolehkan tuntutan nafkah yang diajukan oleh Penggugat.

Untuk Pegawai Negeri Sipil juga memiliki konsekuensi hukum yang harus ditaati bagi yang akan melangsungkan perceraian. Hal ini diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1983 tentang Izin Pekawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil bahwa:

- (1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya;
- (2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya;
- (3) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas isterinya ialah setengah dari gajinya;
- (4) Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzinah, dan atau melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri

³⁴ Edi As'adi, *Hukum Acara Perdata dalam Prespektif Mediasi di Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2012, Hlm. 69

telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

- (5) Apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya;
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak berlaku, apabila istri minta cerai karena dimadu, dan atau suami berzinah, dan atau suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri, dan atau suami menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- (7) Apabila bekas isteri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.

Dari Peraturan Pemerintah di atas bagi Pegawai Negeri Sipil sebagai Pemohon dalam perkara Cerai Talak yang beragama Islam tidak hanya secara khusus memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah mut'ah, nafkah madiyah, nafkah iddah, dan nafkah anak saja, tetapi sebagaimana ayat (6) Peraturan Pemerintah di atas wajib menafkahi hingga bekas istri Pegawai Negeri Sipil tersebut kawin lagi. Yang dengan tujuan tidak membiarkan anak dan mantan istrinya dengan tanpa nafkah sampai dengan menikah lagi bersama laki-laki yang kemudian akan bertanggungjawab kepada dirinya.

Konsekuensi tersebut tentunya menjadi suatu hal yang harus dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil pria yang akan telah bercerai. Namun sebelum semua itu dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang, sesuai dengan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1983 tentang Izin Pekawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang bunyinya³⁵:

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang melanggar salah satu atau lebih kewajiban/ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 14, tidak

³⁵ Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1983 tentang Izin Pekawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

melaporkan perceraianya dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai terjadinya perceraian, dan tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun erhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

- (2) Pegawai Negeri Sipil wanita yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2), dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- (3) Atasan yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat 2, dan Pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 12, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Dan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menolak melaksanakan ketentuan pembagian gaji tersebut sesuai dengan Pasal 16 Pemerintah Nomor: 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil bahwa:

“Pegawai Negeri Sipil yang menolak melaksanakan ketentuan pembagian gaji sesuai dengan ketentuan Pasal 8, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil”

Yang dimaksud dijatuhi disiplin berat sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil:

Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari³⁶ :

- a. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- b. Pembebasan dari jabatan;

³⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010

- c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai Negeri Sipil; dan
- d. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Namun, sejauh ini regulasi peraturan pemerintah ini belum dapat diterapkan secara maksimal. Terlebih pada Peraturan Pemerintah ini hanya berhenti pada izin atasan yang kemudian tidak memiliki dampak selain pemenuhan syarat administratif.

2. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Perceraian Dengan Surat Izin Atasan Bagi Pegawai Negeri Sipil

Pengambilan putusan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum mengenal istilah *ex officio* menurut Kamus Hukum diartikan karena jabatan, seperti dalam kalimat memangku jabatan secara *ex officio*.³⁷ Sedangkan menurut subekti bahwa pengertian hak *ex officio* berasal dari Bahasa latin *ambtshalve* Bahasa Belanda yang berarti karena jabatan, tidak berdasarkan surat penetapan atau pengangkatan, juga tidak berdasarkan suatu permohonan.³⁸ Maka secara defenitif dimaknai suatu hak atau kewenangan yang dimiliki oleh Hakim karena jabatannya, dan salah satunya adalah untuk memutus atau memberikan sesuatu yang tidak ada dalam tuntutan.

Ex officio mendasar dalam Pasal 178 HIR ayat (3) dan Pasal 189 RBg ayat (3) menyebutkan bahwa Hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih yang dituntut.³⁹ Namun khususnya dalam perkara perceraian diatur khusus bahwa Hakim diperbolehkan untuk mewajibkan sesuatu kepada mantan suami atau mantan isteri. Dengan tujuan menegakkan keadilan dan kemaslahatan sebagaimana hak *ex officio* diatur dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang bunyinya:

“Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri.” Sehingga dari pasal ini dalam perkara perceraian menjadi landasan bagi Hakim untuk memutus di luar tuntutan.

³⁷ Yan Pramudya Puspa, *Kamus Hukum*, Semarang, Aneka, 1977, Hlm. 366

³⁸ Subekti dan R. Tjitrosoedibjo, *Kamus Hukum, Cet ke-4*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1979, Hlm. 43

³⁹ Soeroso, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, Hlm. 134

Dengan dinamika dan perkembangan zaman yang semakin meningkat, maka tidak menutup kemungkinan hakim berwenang melakukan *contra legem* apabila ketentuan suatu pasal undang-undang bertentangan dengan kepatutan dan tidak sesuai dengan kenyataan dan keadaan yang berkembang dalam jiwa, perasaan dan kesadaran masyarakat.⁴⁰ Sebagaimana dalam perkara perceraian talak, secara hak *ex officio* pun tanpa ada gugatan rekonsvansi dari isteri dapat menjatuhkan hukum bagi suami sebagai Pemohon untuk membayar nafkah. Termasuk Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang kemudian diterapkan dalam memeriksa dan memutus perkara yang kaitannya dengan agama menentukan suatu kewajiban yang melekat pada diri suami sebagai suatu akibat perbuatan hukum tertentu.⁴¹

Selain memahami suatu konteks hak *ex officio* tentunya tidak terlepas dari pada teori kemaslahatan, seperti dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Anbiyya' ayat 107⁴² :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾

Artinya: Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.

Dari ayat tersebut di atas bahwa sesungguhnya hadirnya Hukum Islam sebagai rahmat bagi seluruh manusia dan alam, tidaklah terwujud kecuali jika benar-benar demi kemaslahatan dan kebaikan bagi manusia. Dalam kaidah fihiyyah disebutkan:

لضرر روف ع قدر الإمكان

Artinya: Kemudharatan dihilangkan sekadar kemampuan

Dari kaidah di atas dapat diketahui bahwa adanya suatu kewajiban menghindarkan akan terjadinya suatu kemudharatan atau dengan kata lain bahwa

⁴⁰ Hartini, *Pengecualian terhadap Penerapan Asas Ultra Petitum Partium*, Mimbar Hukum, Juni 2009, Hlm. 387

⁴¹ Fauzan, Edy Noerfuady, *Problemтика Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian*, Jakarta, Al-Hikmah & DITBINBAPERA Islam, 1997, Hlm. 90

⁴² Al-Qur'an Ayat 107

usaha agar terjadinya suatu kemudharatan atau dengan kata lain bahwa usaha agar jangan sampai terjadi suatu kemudharatan dengan segala upaya yang mungkin untuk diusahakan. Yang kemudian dikutip dalam hadist Nabi yang bunyinya:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: Tidak ada Kemudharatan dan tidak memudharatkan.

Terlebih dalam regulasi perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1983 tentang Izin Pekawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil maka suatu syarat administratif bagi Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon tidak hanya menjadi syarat tapi berdampak pada konsekuensi hukum yang dijelaskan dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1983 tentang Izin Pekawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil bahwa⁴³:

- (1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya;
- (2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya;
- (3) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas isterinya ialah setengah dari gajinya;
- (4) Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzinah, dan atau melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

⁴³ Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1983 tentang Izin Pekawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

- (5) Apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya;
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak berlaku, apabila istri minta cerai karena dimadu, dan atau suami berzinah, dan atau suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri, dan atau suami menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- (7) Apabila bekas isteri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi;

Maka demikian sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut, Majelis Hakim secara *ex officio* dibenarkan memutus suatu perkara khususnya cerai talak dengan mempertimbangkan kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil dan konsekuensi hukumnya.

Perlu diperhatikan bahwa dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil tentunya sebagai aturan khusus bagi Pegawai Negeri Sipil yang bercerai (*lex specialis derogate generalis*) bukan kemudian tidak mengindahkan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 3 Tahun 2018 tentang Hasil Pleno Kamar sebagaimana pelaksana atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Yang mana justru memberikan dampak positif bagi perlindungan hak-hak isteri. Pelaksanaan dalam perkara cerai talak sesuai dengan Pasal 140 Kompilasi Hukum Islam akibat talak bunyinya⁴⁴:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;

⁴⁴ Kompilasi Hukum Islam

- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telahdi jatuhi talak balin atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
- d. memeberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun

Pasal tersebut tetap dilaksanakan secara konsekuensi hukum akibat talak. Namun disisi lain dengan adanya aturan khusus bagi laki-laki Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan perkara perceraian, maka dibebani dengan aturan yang berlaku yang pada pokoknya:

- a. Apabila ada anak maka pembagiannya adalah sepertiga untuk mantan isteri, sepertiga untuk anak, dan sepertiga bagian gajinya untuk dirinya;
- b. Apabila belum dikaruniai anak maka pembagiannya adal setengah bagian untuk mantan isteri dan setengah bagian gaji untuk dirinya;

Sedangkan dalam Pasal 8 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1983 tentang Izin Pekawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang pada pokoknya hak mantan isteri atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi memang perlu dibatasi. Apabila mengacu pada Hukum Islam tentunya sesuai dengan masa iddah yakni selama tiga kali suci atau haidh (quru'), sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 228⁴⁵:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ

كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي

عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

⁴⁵ Al-Qur'an Q.S Al-Baqarah ayat 228

Artinya: wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Maka bisa dinisbatkan sesuai dengan ajaran agama Islam, hanya saja dalam menetapkan besaran nafkahnya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1983 tentang Izin Pekawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, yakni sepertiga bagian jika memiliki anak dan seperdua bagian gaji apabila tidak dikaruniai anak. Sedangkan untuk nafkah yang diberikan kepada anak sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam bahwa anak wajib hukumnya diberikan nafkah hadhanah sampai usia 21 tahun.

3. Pelaksanaan Putusan Hakim Dalam Penetapan Nafkah Terhadap Perceraian Yang Diajukan Oleh Pegawai Negeri Sipil

Pelaksanaan putusan Hakim dalam penetapan Nafkah terhadap perceraian yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil tentunya akan menimbulkan suatu polemik yang belum terjawab. Pada dasarnya yang diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim hanyalah para pihak yang tercantum dalam gugatan. Dalam permasalahan ini adanya izin atasan bagi Pegawai Negeri Sipil selain berdampak pada ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1983 tentang Izin Pekawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil tentang pembagian gaji untuk mantan isteri dan anak. Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1983 tentang Izin Pekawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud pembagian gaji tersebut ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isteri, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya. Jumlah gaji yang harus dibagikan menurut

Pasal 8 huruf b ini adalah secara proporsional, sehingga gaji Pegawai Negeri Sipil yang ada dibagi habis untuk dirinya, istri, dan anak atau anak-anaknya.⁴⁶ Tentunya dalam hal akan melibatkan bendahara instansi, yang kemudian bendahara instansi bukanlah pihak yang berperkara dalam perceraian.

Dalam hal ini penulis mencoba untuk menjawab pelaksanaan putusan hakim dalam penetapan nafkah terhadap perceraian yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil. Telah dijelaskan bahwa bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengajukan perkara perceraian harus mendapatkan izin atasan, yang kemudian ketika Pegawai Negeri Sipil tidak meminta izin lalu melakukan perceraian maka akan dikualifikasikan sebagai melanggar hukum khusus perceraian sebagaimana menurut Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1983 tentang Izin Pekawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan ditekankan dalam Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan untuk Menyelesaikan Masalah Perceraian Pegawai Negeri Sipil bahwa⁴⁷:

“Pegawai Negeri Sipil baik pria maupun wanita yang akan melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai Tergugat, wajib memberitahukan secara tertulis adanya gugatan dari suami atau isterinya melalui saluran hirarki kepada pejabat yang mendapatkan surat keterangan, dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja ia menerima gugatan perceraian yang dibuat.”

Dengan adanya ketentuan tersebut tentunya setiap atasan instansi pemerintah telah mengetahui bahwa akan terjadinya proses perceraian yang akan dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil. Yang kemudian dalam prosesnya oleh Pejabat yang berwenang akan dicatatkan perceraian dalam setiap masing-masing lingkungan instansi pemerintahan. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

⁴⁶ Dr. Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, Hlm,464

⁴⁷SE Kepala BAKN Nomor: 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan untuk Menyelesaikan Masalah Perceraian Pegawai Negeri Sipil

Nomor: 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil bunyinya⁴⁸:

“Setiap Pejabat atau Pejabat lain yang ditunjuk olehnya membuat dan memelihara catatan perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya masing-masing.”

Tidak hanya dicatatkan dalam data induk kepegawaian masing-masing instansi tapi setiap instansi pemerintahan membuat salinan dan tembusan surat-surat perceraianya meliputi izin atasan dan salinan putusan pengadilan untuk dibuatkan tembusan surat kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, Pimpinan masing-masing Bank milik Negara, Badan Usaha milik Negara, Bank milik Daerah, Badan Usaha milik Daerah, serta Bupati Kepala Daerah Tingkat II, hal ini dijelaskan dalam Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil,

- (1) Berdasarkan salinan dan tembusan surat-surat dimaksud dalam ayat (1) Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, Pimpinan masing-masing Bank milik Negara, Badan Usaha milik Negara, Bank milik Daerah, Badan Usaha milik Daerah, serta Bupati Kepala Daerah Tingkat II, membuat dan memelihara :
 - a. catatan perkawinan dan perceraian;
 - b. kartu isteri/suami

Maka dengan keterangan beberapa pasal dan surat edaran Kepala BKN tersebut sebenarnya sangat mempermudah dalam pelaksanaan putusan Hakim. Dalam pertimbangan Majelis Hakim tentunya akan dicantumkan segala hal yang menjadi konsekuensi perceraian oleh Pegawai Negeri Sipil sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Yang kemudian dituangkan dalam amar putusan layaknya

⁴⁸Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

putusan perkara perceraian yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya (non Pegawai Negeri Sipil).

Dikarenakan dalam pelaksanaannya Pemerintah Nomor: 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1983 tentang Izin Pekawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil mengatur bahwa kewajiban bagi Pegawai Negeri Sipil yang bercerai untuk melaporkan hasil putusan Pengadilan Agama, maka berdasarkan putusan tersebut oleh atasan instansi akan dijadikan pertimbangan untuk memerintahkan bendahara instansi menjalankan isi putusan Pengadilan Agama tersebut. Adapun ketika setelah putusan berkekuatan hukum tetap sedangkan Pemohon/Penggugat tidak melaporkan hasil putusan pengadilan kepada atasan dan diketahui telah bercerai dengan istri atau suaminya maka dianggap menolak melaksanakan pembagian gaji sebagaimana ketentuan yang imperatif dalam Pasal 8 maka dijatuhi hukuman disiplin berat, dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 53 Tahun 2010.

Untuk pemberian gaji yang kemudian akan diberikan kepada mantan isteri dan anak atau anak-anaknya dalam hal ini ada dua cara yakni:

- a. bendaharawan gaji wajib menyerahkan secara langsung bagian gaji yang menjadi hak bekas isteri dan anak atau anak-anaknya sebagai akibat tanpa terlebih dahulu menunggu pengambilan gaji dari Pegawai Negeri Sipil bekas suami yang telah menceraikannya;
- b. bekas isteri dapat mengambil bagian gaji yang menjadi haknya secara langsung dari bendaharawan gaji, atau dengan surat kuasa, atau dapat meminta untuk dikirimkan kepadanya.⁴⁹

Sehingga pemerlakuan bagi Pegawai Negeri Sipil harus dilakukan secara khusus demi membantu terlaksananya Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1983 tentang Izin Pekawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Baik dari aparat penegak hukum di Pengadilan, Hakim, Panitera, Ketua Pengadilan dan instansi pemerintahan lainnya harus saling bersinergi agar putusan Pengadilan dapat dilaksanakan

⁴⁹ *Op.cit.* Hlm. 462

sebagaimana ketentuan yang berlaku. Sehingga seharusnya Pengadilan berhak mengirim salinan putusan kepada instansi terkait, agar sebagaimana Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1983 tentang Izin Pekawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dapat dilaksanakan dan diambil alih oleh pimpinan setiap instansi pemerintahan.

KESIMPULAN

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan perkara perceraian tentunya dalam hal ini ada konsekuensi hukum yang harus dilakukan, baik secara administratif dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami yang kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil. Adapun izin atasan tersebut diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1983 tentang Izin Pekawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang bunyinya

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat;
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;

Adapun kewajibannya diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1983 tentang Izin Pekawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang pada pokoknya

1. Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya;
2. Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya;

3. Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas isterinya ialah setengah dari gajinya;

Kedudukan *ex officio* Hakim dalam memutus perkara perceraian dengan surat izin atasan bagi Pegawai Negeri Sipil. Dasarnya pada Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang bunyinya:

“Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri.

Yang kemudian dianulir melalui Hadist riwayat Nabi yang bunyinya:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: Tidak ada Kemudharatan dan tidak memudharatkan

Yang kemudian dalam perkara Cerai Takak dengan melihat ketentuan daripada Pasal 140 Kompilasi Hukum Islam akibat talak Maka apabila sedemikian rupa peraturan sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut, Majelis Hakim secara *ex officio* dibenarkan memutus suatu perkara khususnya cerai talak dengan mempertimbangkan kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil dan konsekuensi hukumnya. Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil tentunya sebagai aturan khusus bagi Pegawai Negeri Sipil yang bercerai (*lex specialis derogate generalis*).

Adanya kewajiban bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah bercerai untuk melaporkan kepada atasan dengan melampirkan putusan pengadilan dan akta cerai. Maka pelaksanaannya yang kemudian memerintahkan bendaharawan gaji untuk membagi gaji keseluruhannya kepada mantan isteri dan anak atau anak-anaknya adalah atasan yakni pejabat yang berwenang pada instansi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan:

Al-Qur'an Terjemahan Q.S At-Thalaq ayat 7

HR Bukhari dan Muslim dan selain keduanya.

Departemen Agama R.I *Al-Qur'an dan Terjemah*

Instruksi Presiden RI Nomor: 1 Tahun 1991 - Kompilasi Hukum Islam

Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian

Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Surat Edaran Kepala BAKN Nomor: 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan untuk Menyelesaikan Masalah Perceraian Pegawai Negeri Sipil

Buku:

Abdul Aziz Dahlan, 2009, Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid ke 4, Ictiar Baru Van Hoeven, Jakarta

Abu Bakar bin Mas'ud al – Kasany, Al – bada'i al – Shana'i. Juz 4, 2010, Dar al – Kutub al – Ilmiyah, Beirut

Ahmad bin Muhmmad al – Dardiri, al – Syarh al – Shaghir Juz. 2

A.Rasyid Roihan. *Hukum acara Peradilan Agama*, 2005, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Ahmad bin Syu'aib Abu 'Abd al-Rahman al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'iy-al-Mujtabi*, (Halab: Maktab al-Mathbu'at al-Islamiyyah, 1986), Juz 6. h. 144. Lihat juga: Ahmad bin al-Husain bin 'Ali bin Musa Abu Bakar al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*, (Makkah al-Mukarramah: Maktabah Dâr al-Baz, 1994), Juz 7, hlm. 474. Muhammad bin 'Ali bin Muhammad al-Syaukani, *Nail al-Authâr min Ahâdîts Said al-Akhhbâr Syarh Muntaqa al-Akhhbâr*, (t.tp: Idarah al-Thaba'ah al-Minbarah, t.th.), Juz 7, hlm. 103 dan 108. 'Ali bin 'Umar Abu al-Hasan al-Daruquthni, *Sunan al-Daruquthniy*, (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1966), Juz 4

Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, 2014, Ghalia Indonesia, Bogor

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*

- Beni Ahmad Saebani, Fikih Munakahat (buku II), 2001, Pustaka Amani, Bandung
- Drs. H. Abd.Rahman Ghazaly, M.A., 2003, *Fiqih Munakahat*, Prenanda Media, Jakarta Timur
- Dr. Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, Hlm, 464
- Dra. Nurul Zuriah, M.Si, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, 2009, Jakarta
- Edi As'adi, *Hukum Acara Perdata dalam Prespektif Mediasi di Indonesia*, 2012, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Fauzan, Edy Noerfuady, *Problemтика Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian*, 1997, Al-Hikmah & DITBINBAPERA Islam, Jakarta
- Hartini, *Pengecualian terhadap Penerapan Asas Ultra Petitem Partium*, Juni 2009, Mimbar Hukum, Jakarta
- Malik bin Anas, Al – Mudawwamat al – Kubra, Beirut, Dar al – Fikr al – Arabi, juz 4,
- Mardani, *Hadist Ahkam*, 2012, Rajawali Pers, Jakarta
- Muwaffiq al – Din Ibnu Qudamah, al- Mughny, 1997, Dar Alim al – Kutub, Kuwait
- Muhammad bin Ibrahim Ibn Al – Munzir Al – Naisabury, Loc Cit
- Poewardarmita, *Kamus Umus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1980, Jakarta
- Sayyid Sabiq, Fiqh al – Sunnah Juz. 2, al – Fath li al – A'lam al – Arabiy, Kairo
- Soeroso, *Hukum Acara Perdata*, 2010, Sinar Grafika, Jakarta
- Subekti dan R. Tjitrosoedibjo, *Kamus Hukum, Cet ke-4*, 1979, Pradnya Paramita, Jakarta,
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, 1983, Intermasa, Jakarta
- Syuhada, Analisis Tentang Konsekuensi Yuridis Harta Bersama Terhadap Kewajiban Suami Memberi Nafkah dalam KHI, Vol. 1 No. 1 (Mei, 2013),
- Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh al-Islâmi wa Adillatuh*. (Dar al-Fikr, Beirut, 1998), Juz 7, hlm. 658. Lihat juga dalam: Ahmad bin Ghanim bin Salim al-Nafrawiy al-Malikiy, *al-Fawakih al-Diwaniy*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1415 H), Juz 2
- Wahbah al – Zuhaili, Tafsir al – Munir, Beirut, Dar al – Fikr, 2008, juz 28
- WJS Purwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2008, Balai Pustaka, Jakarta
- Yan Pramudya Puspa, *Kamus Hukum*, 1977, Aneka, Semarang

Website

Dikutip dari website Badan Kepegawaian Negara, bkn.go.id, pada Senin, 25 Desember 2019, pukul 20.00 WIB

LAMPIRAN PERTIMBANGAN DAN AMAR PUTUSAN

NOMOR PERKARA	SURAT IZIN ATASAN	PERTIMBANGAN HUKUM	AMAR PUTUSAN
139/Pdt.G/2020/PA Tlm Cerai Talak	Permohonan Izin Cerai yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Gorontalo Utara, dengan Nomor 2108/Kk.30.04/I/HK.03.4/05/2019 tertanggal 13 Juni 2019;	<p>Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi sebagai Aparatur Sipil Negara telah mendapatkan izin perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Kapolri Nomor 9 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Nomor 2108/Kk.30.04/I/HK.03.4/05/2019 tertanggal 13 Juni 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Gorontalo Utara, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan ketahapan pemeriksaan permohonan Pemohon Konvensi</p> <p>DALAM REKONVENSI</p> <p>Menimbang, bahwa segala hal-ihwal yang telah diuraikan di atas merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan perkara rekonsvensi ini;</p> <p>Menimbang, bahwa dalam perkara ini penyebutan Termohon Konvensi berubah menjadi Penggugat dalam rekonsvensi yang selanjutnya disebut Penggugat Rekonsvensi, sedangkan penyebutan Pemohon berubah menjadi Tergugat dalam rekonsvensi yang selanjutnya disebut Tergugat Rekonsvensi;</p> <p>Menimbang, bahwa gugatan rekonsvensi Penggugat Rekonsvensi telah diajukan sesuai maksud ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg., dan gugatan rekonsvensi tersebut memiliki koneksitas/<i>innerlijke samen hangen</i> dengan permohonan Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonsvensi. Oleh karena itu, gugatan rekonsvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsvensi dapat dipertimbangkan untuk selanjutnya;</p> <p>Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonsvensi menuntut kepada Tergugat Rekonsvensi hal-hal sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nafkah Lalai untuk anak-anak selama 25 bulan dengan perhitungan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari x 750 = Rp. 375.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah); 2. Nafkah iddah selama 3 bulan dengan perhitungan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) x 90 hari = Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah); 3. Nafkah Mut'ah sebesar 100 Gram emas ; 4. Biaya uang muka pembayaran mobil sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) 5. Nafkah anak (biaya hadhanah) Rp.4.000.000,- (empat juta ribu rupiah) perbulan hingga anak dewasa dan mandiri; <p>Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonsvensi tersebut, Tergugat Rekonsvensi dalam jawabannya secara tertulis menyatakan pada pokoknya antara lain yaitu :</p> <p>Bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonsvensi Tergugat Rekonsvensi hanya sanggup membayar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)</p>	<p>Dalam Rekonsvensi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsvensi untuk sebagian. 2. Menghukum Tergugat Rekonsvensi untuk membayar kepada Penggugat, sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Nafkah Lalai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); b. Nafkah Iddah sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah); c. Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). 3. Menghukum Tergugat Rekonsvensi untuk memberikan/membayar nafkah anak berkelanjutan kepada Penggugat Rekonsvensi sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai ketiga anak tersebut dewasa atau mandiri; 4. Menghukum kepada Tergugat Rekonsvensi untuk membayar seluruh pembebanan yang telah ditetapkan kepada Penggugat Rekonsvensi sebagaimana diktum amar point 2 (dua)

	<p>Menimbang, bahwa dalam replik rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap pada gugatan rekonvensinya</p> <p>Menimbang, bahwa Tergugat dalam Dupliknya menyatakan bertetap pada jawabannya;</p> <p>Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tidak menghadirkan alat bukti dalam persidangan;</p> <p>Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menghadirkan 3 alat bukti, berupa rindian gaji dan pendapatan lain, bukti pembayaran laundry dan bukti transfer bank;</p> <p>Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu tuntutan Penggugat Rekonvensi dimaksud;</p> <p>NAFKAH LALAI TERGUGAT</p> <p>Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan sejak berpisah sudah sekitar 2 tahun 1 bulan, sehingga dalam ini Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau selama 25 bulan sejak berpisah hingga sekarang dengan perhitungan 25 bulan 750 hari dengan jumlah tuntutan perhari sejumlah Rp. 500.000,- sehingga jumlah tuntutan nafkah lalai menjadi 25 bulan (750 hari) x Rp 500.000,-/hari = Rp 375.000.000. (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);</p> <p>Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan mengenai telah terjadi pisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :</p> <p>Menimbang, bahwa seorang suami memiliki tanggung jawab atas segala keperluan istri dalam hal pemenuhan nafkah, pakaian dan tempat kediaman, dan juga istri mempunyai kewajiban yaitu mengatur nafkah yang diterima dari suaminya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan keperluan yang dibutuhkan oleh keluarganya. Kewajiban dan tanggung jawab memberikan nafkah ini akan selalu mengikuti dimanapun seorang suami berada meskipun suami harus pergi meninggalkan keluarga untuk beribadah, kewajiban tersebut tidak pernah gugur;</p> <p>Menimbang, bahwa istri tidak berhak mendapatkan nafkah atau kewajiban suami gugur memberikan nafkah kepada istrinya apabila istri diketahui berbuat <i>nuzyus</i>, salah satu sikap <i>nuzyus</i> dari istri adalah melalaikan tanggung jawabnya sebagai istri, tidak mau tinggal serumah dengan suaminya, tidak mau taat kepada suami, menelantarkan anak, dan keluar rumah tanpa meminta izin dari suaminya;</p> <p>Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah pisah tempat tinggal sekitar 2 tahun lamanya;</p> <p>Menimbang, bahwa berdasarkan yang telah diajukan oleh Tergugat Rekonvensi dalam konvensi dalam perkara ini, meskipun tidak dalam bentuk alat bukti karena hanya fotokopi biasa yang tidak bermeterai dan dinazagelen, yang dimaksudkan sebagai wujud tanggungjawab Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah, dalam jumlah yang beragam dan tidak pasti, dan oleh karena tidak adanya standar baku mengenai berapa jumlah nafkah yang harus diberikan oleh Tergugat</p>	<p>sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar Talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Tilamuta</p>
--	---	---

		<p>Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, meskipun tentunya harus didasarkan pada standar kelayakan dan kepatutan;</p> <p>Menimbang, bahwa terhadap semua tuntutan Penggugat Rekonvensi atas kesanggupan Tergugat Rekonvensi baik dalam tahapan jawaban Rekonvensi maupun pada tahapan kesimpulan menyatakan menyanggupi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dan Penggugat Rekonvensi tetap menyatakan pada gugatannya;</p> <p>Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan kesanggupan pihak Tergugat Rekonvensi, dengan sikap Penggugat Rekonvensi yang bertetap pada gugatannya tersebut, maka demi untuk kemaslahatan dan adanya kepastian hukum atas pembebanan nafkah lalai terhadap Penggugat Rekonvensi, dan diperteguh dengan adanya bukti tanggung jawab Tergugat Rekonvensi atas nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim kemudian menyimpulkan bahwa meskipun Tergugat Rekonvensi selama berpisah tetap masih memberikan kiriman nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, namun karena hanya beberapa kali, maka kemudian kepadanya oleh Majelis Hakim dihukum untuk tetap memberikan nafkah dari nafkah lalai kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);</p> <p>TENTANG NAFKAH IDDAH</p> <p>Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah 3 bulan (90 hari) x Rp 500.000 = Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);</p> <p>Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, <i>maskan</i> dan <i>kiswah</i> kepada bekas istri selama iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau <i>nusyuz</i> dan dalam keadaan tidak hamil;</p> <p>Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dimengerti bahwa dalam membebankan kepada bekas suami untuk memberikan nafkah iddah kepada bekas istri harus memenuhi 2 (dua) unsur yaitu adanya kemampuan suami dan istri tidak berbuat <i>nusyuz</i>;</p> <p>Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah, sebagaimana yang diatur pula dalam Pasal 149 ayat (b) KHI, dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami dan kebutuhan isteri saat ini secara wajar;</p> <p>Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam Kitab Iqna' Juz IV Halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa :</p> <p>والمتحدة الرجعية للرائى والنفقة والفسوة</p> <p>Artinya: “Bagi perempuan yang menjalani iddah talak raj’i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian, yang layak”.</p> <p>Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi, maka kepada Tergugat Rekonvensi dibebani dan dihukum untuk membayar nafkah Iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), berdasarkan azas kepatutan dan kelayakan atas Tergugat Rekonvensi;</p> <p>TENTANG MUT’AH</p>	
--	--	---	--

		<p>Menimbang, bahwa mengenai tuntutan mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa 100 Gram emas. Sesuai ketentuan Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami, dan besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami. Terkait hal ini sebagaimana Allah SWT telah berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 236 yang artinya:</p> <p><i>"... Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (bekas isterimu), orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan."</i></p> <p>Serta firman Allah dalam QS. Al-Thalaq ayat 7 yang berbunyi :</p> <p>Yang artinya : <i>"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya..."</i></p> <p>Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan tersebut di atas dapat dipahami bahwa apabila perceraian adalah kehendak suami, maka memberikan mut'ah kepada bekas isteri merupakan kewajiban yang harus ditunaikan, kaya atau miskinnya bekas suami, tetap berkewajiban untuk memberikan mut'ah sesuai kemampuannya. Oleh karena perceraian ini adalah kehendak Tergugat maka kepadanya dituntut untuk wajib memberikan mut'ah kepada Penggugat;</p> <p>Menimbang, bahwa hakekat dari tujuan pembebanan <i>mut'ah</i> adalah untuk mengurangi kesedihan hati sekaligus sebagai kenang-kenangan bagi seorang isteri yang telah ditalak oleh suaminya, dan pemberian <i>mut'ah</i> itu dalam ketentuan agama harus ditunaikan dengan cara yang <i>ma'ruf</i> agar tujuan pemberian <i>mut'ah</i> tersebut dapat tercapai;</p> <p>Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya menuntut Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa emas 100 Gram, dan berdasarkan nilai kepatutan karena Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar segala tuntutan berupa sejumlah uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga dengan demikian kepada Tergugat Rekonvensi diperintahkan untuk memberikan mutah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);</p> <p>TENTANG NAFKAH ANAK BERKELANJUTAN</p> <p>Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, maka ayah tetap bertanggung jawab dan berkewajiban untuk memberikan biaya pemeliharaan (<i>hadhanah</i>) kepada anak sampai anak tersebut dewasa sebagaimana maksud Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;</p> <p>Menimbang, bahwa seorang ayah dibebankan untuk menafkahi anaknya hingga dewasa sesuai dengan kesanggupan atau kemampuannya. Kelalaian seorang ayah untuk menafkahi anaknya merupakan pelanggaran terhadap Pasal 4, 7, 8, 9 dan 13 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan Pasal 9 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;</p> <p>Menimbang, bahwa pada prinsipnya dalam Islam, anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT. Anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh</p>	
--	--	--	--

		<p>kedua Orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak ke dalam neraka, kedua Orang tualah yang paling bertanggung jawab terhadap keselamatan anaknya dunia akhirat dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini sesuai firman Allah SWT. surat At-Tahrim ayat 6 yang artinya: Artinya : “ <i>Wahai orang-orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka</i> ” ;</p> <p>Menimbang, bahwa salah satu anggota keluarga inti adalah anak, oleh karena itu kedua Orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya, agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani, dan berakhlakul karimah serta memiliki intelegensi yang tinggi, anak dapat membuat senang hati kedua orang tuanya, manakala anak tersebut berbakti kepada mereka, serta taat dalam menjalankan ibadahnya. Namun anak juga dapat membuat susah kedua orang tuanya manakala anak tersebut tidak berbakti kepadanya, serta tidak taat beribadah, sehingga kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya (vide Pasal 45 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);</p> <p>Menimbang, bahwa Orang tua bertanggung jawab atas kesejahteraan dan masa depan anak. Orang tua yang dimaksud adalah bapak dan ibu, sehingga yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah ayah dan ibu tanpa melihat bahwa ayah dan ibu telah berpisah, kewajiban tersebut tetap melekat kepadanya;</p> <p>Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya menuntut nafkah anak berkelanjutan untuk 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)/ bulan;</p> <p>Menimbang, bahwa memperhatikan tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas dan sebagaimana pernyataan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak berkelanjutan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), hal mana Penggugat Rekonvensi dalam tahapan kesimpulannya secara tertulis menyatakan menuntut nafkah anak ini untuk kepentingan anak, dan Tergugat Rekonvensi menyatakan akan bertanggungjawab terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena anak-anak tersebut adalah amanah dari Tuhan, sehingganya patut dan adil apabila Tergugat Rekonvensi dalam hal ini sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dihukum untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut setiap bulan kepada ketiga (3) anak-anak tersebut sampai mereka benar-benar dewasa atau mandiri dan diberikan secara sukarela;</p> <p>Menimbang, bahwa terdapat beberapa bahkan banyak kasus di Pengadilan Agama dalam hal suami dibebankan oleh pengadilan untuk membayar nafkah kepada bekas isterinya, namun setelah mengikrarkan talaknya, suami enggan untuk memenuhi pembebanan dimaksud dengan berbagai alasan. Meskipun pemenuhan pembebanan suami itu dapat dilakukan melalui eksekusi, akan tetapi terdapat kesulitan dihadapi oleh istri ketika akan dilakukan eksekusi, diantaranya istri tidak mengetahui jumlah harta kekayaan atau tidak dapat menunjukkan barang milik bekas suaminya yang akan diletakkan sita untuk dijual lelang, apalagi jika bekas suami beritikad tidak baik dengan menyembunyikan atau tidak mau menunjukkan harta miliknya. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pemenuhan pembebanan nafkah kepada bekas suami dengan cara eksekusi untuk masa sekarang tidak</p>	
--	--	---	--

		<p>dapat lagi diterapkan dan harus ditinggalkan. Dengan demikian, untuk menghindari sifat <i>illusoir</i> (hampa) pembebanan nafkah dan melindungi Penggugat Rekonvensi dari spekulasi Tergugat Rekonvensi dalam memenuhi prestasi tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa sudah sepatutnya dan seyogyanya Tergugat Rekonvensi dapat untuk membayar dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah lampau, iddah dan mut'ah dan melaksanakan nafkah anak berkelanjutan dimaksud sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Tilamuta;</p> <p>Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan pengasuhan anak, oleh karena anak-anak tersebut telah masing-masing berusia 17 tahun dan 15 tahun dan 13 tahun, sehingga masing-masing telah bebas memilih untuk mengikuti antara Penggugat Rekonvensi dan atau Tergugat Rekonvensi, sebagaimana ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan anak yang belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya. Setelah anak tersebut berusia 12 tahun maka dia diberikan kebebasan memilih untuk diasuh oleh ayah atau ibunya, dan bahwa saat ini ketiga anak tersebut tinggal mandiri di rumah bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sehingga fakta adanya tanggungjawab penuh kepada anak-anak tersebut meskipun telah tinggal mandiri, akan tetapi tetap menjadi beban seorang ayah, yaitu Tergugat Rekonvensi dan demi untuk kepastian hukum maka kepada Tergugat Rekonvensi dibebankan nafkah kepada ketiga anak tersebut sebesar Rp. 1.500.000,-/bulan dan diberikan sebagai hak langsung ketiga anak tersebut;</p> <p>Menimbang, bahwa meskipun demikian dan untuk kepastian hukum, terhadap tanggungjawab atas ketiga anak tersebut, diserahkan kepada Tergugat Rekonvensi, baik untuk kepentingan kesehatan, pendidikan dan lain-lain sampai dengan anak-anak tersebut dewasa dan mandiri, sebagaimana nominal pembayaran di atas;</p>	
<p>828/Pdt.G/2018/PA.Ptk Cerai Talak</p>	<p>● Surat izin untuk bercerai dari Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Nomor : SIC/04/VIII/KEP/2018 Tanggal 23 Agustus 2018;</p>	<p>Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;</p> <p>Menimbang, bahwa selain tuntutan perceraian, Pemohon juga menuntut hak pemeliharaan terhadap dua anak Pemohon dan Termohon yang bernama lahir di Pontianak tanggal 27 Oktober 19.. dan lahir di Pontianak tanggal 27 November 20.. anak pertama sudah mumayiz dan anak kedua belum mubayyiz ;</p> <p>Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim perlu mengemukakan persyaratan Hadhanah yang terdapat dalam Kitab Kifayatul Akhyar halaman 152 yang diambil alih sebagai pendapat majlis, sebagai berikut :</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggugat Rekonpensi sebagian ; 2. Menetapkan anak Penggugat rekonpensi dan Tergugat rekonpensi yang bernama lahir di Pontianak tanggal 27 Oktober 19.. dan lahir di Pontianak tanggal 27 November 20.. berada dibawah hadhonah Penggugat rekonpensi ; 3. Menghukum Tergugat rekonpensi untuk membayar

	<p>● Termohon menyerahkan Surat Keterangan Untuk Menghadapi Gugatan Perceraian yang dikeluarkan oleh Walikota Pontianak Nomor : 800/171/BK PSDM-D/2018 Tanggal 15 Oktober 2018</p>	<p>1. Berakal sehat ; 2. Merdeka (bukan Hamba sahaya) ; 3. Beragama Islam ; 4. Menjaga kehormatan; 5. Amanah (dapat dipercaya) ; 6. Berada di tempat tinggal si anak dan 7. Selama tidak menikah lagi dan juga dalam Kitab Fiqh al-Usrah al- muslimah, disebutkan syarat hadhanah adalah : 1. Berakal sehat ; 2. Baligh; 3. Mempunyai kemampuan untuk mendidik (termasuk mempunyai waktu); 4. Amanah (dapat dipercaya); 5. Bermoral / berakhlak mulia ; 6. Islam dan 7. Belum menikah kembali ;</p> <p>Menimbang bahwa dari persyaratan tersebut diatas ternyata Pemohon ada satu syarat yang tidak bisa dipenuhi yaitu kurang bermoral (ketika foto berdua dengan wanita lain), serta dalam persidangan acara anak telah menyatakan pilihanya akan ikut Termohon, maka permohonan hadhonah anak dari Pemohon patut untuk ditolak ;</p> <p>DALAM REKONPENSİ</p> <p>Menimbang bahwa Penggugat rekonsensi mengajukan gugat rekonsensi berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonsensi Termohon konvensi/ Penggugat rekonsensi untuk seluruhnya ; 2. Menetapkan hukum bahwa Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi selaku ibu kandung yang berhak dalam hal pengasuhan terhadap kedua anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi dan Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi yaitu : (umur .. tahun) dan (umur .. tahun) ; 3. Menetapkan secara hukum bahwa biaya hadlanah (nafkah anak) serta biaya pendidikan dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Pontianak dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri; 4. Memerintahkan kepada bagian pembayaran gaji Polresta Pontianak untuk memotong langsung gaji Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi sebesar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Pontianak dan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri dan potongan gaji tersebut diserahkan tiap bulan kepada Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi selaku ibu kandung dari anak tersebut yang mempunyai hak sebagai pengasuhnya ; 5. Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah terutang Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi selaku isteri dan anak sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) ; 6. Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi untuk memberi nafkah iddah kepada Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi selaku isteri sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini ; 7. Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi untuk memberi mut'ah kepada Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi selaku isteri sebesar Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) secara 	<p>dan menyerahkan kepada Penggugat rekonsensi nafkah 2 (dua) orang anak perbulan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sampai anak dewasa atau mandiri ;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah terutang kepada Penggugat rekonsensi sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ; 5. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar Mutah kepada Penggugat rekonsensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesaat setelah ikrar talak ; 6. Menolak sebagian dan selebihnya ; <p>DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI</p> <p>Membebaskan kepada Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);</p>
--	--	--	---

		<p>tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini ;</p> <p>8. Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, maka majlis mempertimbangkannya sebagai berikut :</p> <p>Menimbang bahwa sebelum menentukan Penggugat mendapatkan hak asuh anak, Majelis Hakim perlu mengemukakan persyaratan Hadhanah yang terdapat dalam Kitab Kifayatul Akhyar halaman 152 yang diambil alih sebagai pendapat majlis, sebagai berikut :</p> <p>1. Berakal sehat ; 2. Merdeka (bukan Hamba sahaya) ; 3. Beragama Islam ; 4. Menjaga kehormatan; 5. Amanah (dapat dipercaya) ; 6. Berada di tempat tinggal si anak dan 7. Selama tidak menikah lagi dan juga dalam Kitab Fiqh al-Usrah al- muslimah, disebutkan syarat hadhanah adalah : 1. Berakal sehat ; 2. Baligh; 3.Mempunyai kemampuan untuk mendidik (termasuk mempunyai waktu); 4. Amanah (dapat dipercaya); 5. Bermoral / berakhlak mulia ; 6. Islam dan 7. Belum menikah kembali ;</p> <p>Menimbang bahwa dari persyaratan tersebut diatas ternyata pada diri Penggugat ada satu syarat yang tidak bisa dipenuhi yaitu kurang bermoral (karena mendatangi laki-laki lain dan nonton bioskop dengan) namun dalam persidangan acara anak telah menyatakan pilihannya akan ikut Penggugat, maka Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut ;</p> <p>Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 , hak hak anak meliputi :a. nondiskrimasi, b. kepentingan yang terbaik bagi anak, c. hak untuk hidup dan perkembangan dan d. pengharhargaan terhadap pendapat anak , maka Majelis berpendapat berdasarkan empat alasan dalam Undang-undang Nomor 17 tahu 2016 tersebut masa depan anak yang paling menentukan adalah anak itu sendiri, mengingat kedua orang tua memiliki kekurangan dalam segi moralitas, namun dari segi masalahat majlis memandang anak lebih masalahat ikut ibunya selaku Penggugat mengingat anak juga lebih dekat dekat ibunya/Penggugat, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas gugatan hadhonah dua anak dari Penggugat patut untuk dikabulka ;</p> <p>Menimbang bahwa Penggugat menuntut biaya hadlanah (nafkah anak) serta biaya pendidikan dibebankan kepada Tergugat rekonvensi sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Pontianak dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri, mengingat gaji yang diterima Tergugat perbulan tinggal Rp. 2.946.200,- (dua juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah), bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya, maka Tergugat selaku ayah kandung berkewajiban untuk memenuhi biaya pemeliharaan atau nafkah dari dua anak tersebut sebagaimana maksud dari pasal 41 huruf (b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, maka berdasarkan kemampuan, kebutuhan anak, kelayakan dan rasa keadilan, majlis menetapkan nafkah dua orang anak yang harus dibayar Tergugat perbulan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;</p> <p>Menimbang bahwa, anak-anak berada dalam hadhonah Penggugat rekonpensi, maka berdasarkan pasal</p>	
--	--	---	--

		<p>41 huruf (a) dan pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus, oleh karenanya meskipun sampai saat ini anak tersebut masih berada dalam asuhan ibunya (Penggugat), tetapi hak Tergugat untuk menjenguk, menyayangi, mengajak, mendidik anak tersebut secara wajar tidak boleh dihalang-halangi oleh Penggugat atau pihak manapun;</p> <p>Menimbang bahwa Penggugat menuntut biaya hadlanah (nafkah anak) serta biaya pendidikan dibebankan kepada Tergugat rekonvensi untuk memotong langsung gaji Tergugat rekonvensi, telah masuk ranah eksekusi dan menyangkut instansi diluar Pengadilan, maka patut untuk ditolak ;</p> <p>Menimbang bahwa Penggugat menuntut Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah terhutang terhitung mulai bulan Februari 2016 hingga saat ini tepatnya adalah 2 tahun 8 bulan lamanya, /Tergugat Rekonvensi mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhinya yaitu: harus membayar nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonvensi selaku Istrinya dan biaya hadlonah terhutang kepada anak kandungnya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan x 32 (tiga puluh dua) bulan = Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), mengingat nafkah anak terhutang tidak bisa ditutup, dan yang dapat dibebankan pada Tergugt hanya nafkah terhutang bagi Penggugat, hal mana Tergugat mengakui terakhir memberi nafkah terakhir adalah Maret 2016, Penggugat tidak menanggapi lagi, maka harus diartikan nafkah terhutang Tergugat terhadap Penggugat adalah tiga puluh bulan sejak bulan April 2016;</p> <p>Menimbang bahwa yang dikabulkan hanya nafkah terhutang bagi Penggugat, maka majlis menetapkan nafkah terhutang Tergugat untuk Penggugat perbulan Rp, 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) X 30 = Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;</p> <p>Menimbang bahwa Penggugat menuntut Tergugat rekonvensi untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat rekonvensi selaku isteri sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak Tergugat rekonvensi, hal mana majlis telah mempertimbangkan Penggugat telah nusyuz pada Tergugat, berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam "Bekas istri berhak nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz", maka tuntutan nafkah iddah patut untuk ditolak;</p> <p>Menimbang bahwa Penggugat menuntut Tergugat rekonvensi untuk memberi mut'ah kepada Penggugat rekonvensi selaku isteri sebesar Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat rekonvensi, mengingat usia perkawinan telah memasuki dua puluh tahun, dan telah menghasilkan anak dua orang, maka berdasarkan kemampuan, kelayakan dan rasa kedilan majlis menetapkan mut'ah yang harus dibayar Tergugat pada Penggugat adalah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)</p>	
--	--	--	--

<p>197/Pdt.G/2017/PA.Tlm Ceraai Talak</p>	<p>Pemohon sebagai Anggota Polri wajib memperoleh izin atasan untuk melakukan perceraian. Namun Pemohon tidak memperoleh izin tersebut sebagaimana Surat Keputusan Sidang BP4R Nomor Kep/47/VIII/2017 yang diterbitkan pada tanggal 18 Agustus 2017 tentang penolakan permohonan izin Pemohon untuk melakukan perceraian. Namun demikian, Pemohon tetap ingin melanjutkan perkaranya dengan membuat surat pernyataan tertanggal 14 Desember 2017 bahwa Pemohon bersedia dan siap menerima resiko jabatan apapun yang berkaitan</p>	<p>DALAM KONVENSI</p> <p>Menimbang, bahwa Pemohon selaku Anggota Polri telah mengurus izin perceraian dari atasan akan tetapi permohonan tersebut ditolak sehingga Pemohon tidak memenuhi ketentuan administratif Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 jo Pasal 18 Perkapolri Nomor 9 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, namun Pemohon tetap bersikukuh untuk melanjutkan perkaranya dengan membuat surat pernyataan bersedia menerima resiko jabatan apapun dari atasan yang berkaitan dengan status Pemohon sebagai Anggota Polri.</p> <p>DALAM REKONVENSI</p> <p>Menimbang, bahwa segala hal-ihwal yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum perkara konvensi merupakan bagian tak terpisahkan dengan pertimbangan hukum perkara rekonsensi ini;</p> <p>Menimbang, bahwa Penggugat dalam rekonsensinya mengajukan gugatan nafkah anak berkelanjutan sampai anak dewasa dan mandiri sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan dan nafkah madliyah sejak bulan April 2016 sampai dengan dibacakan putusan ini yakni Januari 2018 atau selama 21 bulan sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;</p> <p>Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pengadilan telah melakukan upaya damai, akan tetapi tidak berhasil;</p> <p>Menimbang, bahwa pijakan yuridis dalam mengadili tuntutan nafkah anak pasca perceraian dan nafkah madliyah adalah ketentuan Pasal 41 huruf (b) dan (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (3) dan (5) dan pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan nafkah madliyah adalah ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (5) dan Pasal 80 ayat (2), (4), (5), dan (7) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menetapkan kewajiban suami untuk pemenuhan nafkah istri dan kelalaian atas kewajiban tersebut dapat digugat di pengadilan.;</p> <p>Menimbang, bahwa dalam tahap jawab menjawab Tergugat menyatakan hanya sanggup memenuhi tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri diluar kebutuhan anak yang lain;</p> <p>Menimbang, bahwa Tergugat mengakui pula tidak lagi memberikan nafkah untuk Penggugat sejak bulan April 2016 hingga persidangan ini berlangsung karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Akan tetapi Tergugat secara rutin memberikan nafkah anak kepada Penggugat setiap bulan sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) diluar kebutuhan anak yang lain dan uang tersebut Tergugat tidak mengetahui apakah Penggugat benar-benar hanya menggunakan untuk kebutuhan anak atau tidak. Adapun mengenai tuntutan nafkah madliyah Tergugat menyatakan tidak mampu untuk memenuhi sebagaimana tuntutan Penggugat karena penghasilan</p>	<p>Dalam Konvensi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tilamuta; 3. Menghukum Pemohon untuk membayar : <ol style="list-style-type: none"> a. Nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah); b. Mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); 4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Propinsi Sulawesi Utara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; <p>II. Dalam Rekonsensi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak berkelanjutan sampai dengan
--	--	---	--

	<p>dengan status Pemohon sebagai Anggota Polri dari atasan karena melakukan perceraian tanpa izin dari atasan</p>	<p>Tergugat sebagai anggota Polisi dan gaji dan tunjangan remunerasi sejumlah Rp.5.763.600,- (lima juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah) masih harus dipotong untuk membayar hutang di BRI sejumlah Rp.2.793.000,- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), potongan KPR BTN sejumlah Rp.333.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan potongan rusun sejumlah Rp.100.000,- (seratus juta rupiah) sehingga tersisa tinggal Rp.2.537.600,-;</p> <p>Menimbang, bahwa selain itu Tergugat mengakui memiliki penghasilan lain dari usaha bentor berkisar antara Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) akan tetapi uang tersebut Tergugat pergunakan untuk menanggulangi kebutuhan lain dari anak yang lain dan juga untuk Tergugat berikan kepada orangtua Tergugat. Olehnya Tergugat hanya mampu memberikan kepada Penggugat sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk nafkah lalai setiap bulan selama 21 bulan;</p> <p>Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian Penggugat tidak bisa mengajukan bukti mengenai penghasilan Tergugat sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti TR.1 berupa daftar gaji Tergugat bulan Desember 2017 dan TR.2. daftar tunjangan remunerasi. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga harus dinyatakan terbukti segala hal yang tertuang dalam bukti tersebut yang berkaitan dengan penghasilan Tergugat;</p> <p>Menimbang, bahwa Tergugat tidak bisa membuktikan mengenai potongan-potongan setiap bulan yang dibayarkan oleh Tergugat dari gaji Tergugat sebagai anggota Polisi. Keterangan potongan BRI dan angsuran KPR hanya ditulis tangan pada bukti TR.1 sebagai catatan tambahan demikian pula potongan Rusun hanya ditulis tangan pada bukti TR.2. Tergugat tidak bisa menghadirkan bukti daftar/rincian potongan-potongan gaji dan tunjangan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Dengan demikian, maka dalil Tergugat mengenai potongan-potongan penghasilan dari gaji harus dinyatakan tidak terbukti;</p> <p>Menimbang, bahwa Pasal 80 ayat (4) huruf (c) bahwa suami sesuai dengan penghasilannya menanggung biaya pendidikan bagi anak, Pasal 105 huruf (c) dalam hal terjadi perceraian biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya. Dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam huruf (d) bila mana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;</p> <p>Menimbang, bahwa berdasarkan rasa keadilan, kepatutan dan kebutuhan anak maka Majelis membebaskan kepada Tergugat untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan setiap bulan melalui Penggugat serta penambahan sejumlah 20% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;</p> <p>Menimbang, bahwa suami sebagai kepala rumah tangga berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya akan tetapi kewajiban tersebut akan gugur apabila istri nusyuz.</p> <p>Menimbang, bahwa pada proses persidangan, tidak terbukti bahwa Penggugat telah nusyuz</p>	<p>anak dewasa dan mandiri sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui Penggugat dengan penambahan 20% setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;</p> <p>3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah madliyah selama 21 bulan sebesar Rp.12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);</p> <p>4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;</p>
--	---	---	---

		<p>sehingga Tergugat berkewajiban untuk memberikan nafkah yang dilalaikan tersebut.</p> <p>Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengakui telah melalaikan nafkah sejak bulan April 2016 sampai dengan persidangan berlangsung yang berarti selama 21 bulan. Akan tetapi Tergugat menyatakan hanya mampu memberikan nafkah lalai sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan karena Tergugat memiliki hutang di BRI yang harus Tergugat angsur beserta angsuran-angsuran lainnya dari gaji dan tunjangan. Meskipun Tergugat memiliki penghasilan lain, namun penghasilan tersebut Tergugat gunakan untuk kebutuhan-kebutuhan anak yang lain dan juga Tergugat berikan kepada orangtua Tergugat;</p> <p>Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan unsur kelayakan dan kepatutan serta kemampuan Tergugat dan beban-beban yang harus dipenuhinya setiap waktu, maka pengadilan menilai patut dan layak untuk menghukum Tergugat membayar nafkah madliyah kepada Penggugat sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan atau Rp.12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) selama 21 bulan</p>	
--	--	--	--